



# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung (LKjIP) Tahun 2017



*Performance  
Report 2017*

Pemerintah Kabupaten Badung  
Tahun 2018

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Daftar Isi.....	1
Kata Pengantar .....	2
Sejarah Singkat Kota <i>Mangupura</i> .....	3
BAB I      PENDAHULUAN .....	6
1.1. Tentang Kabupaten Badung.....	1
1.2 Isu-isu Strategis.....	13
1.3 Arah Kebijakan Membangun Pariwisata Berbasis Budaya...	14
BAB II      PERENCANAAN KINERJA .....	17
2.1 RPJMD Semesta Berencana 2016 - 2021.....	17
2.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 .....	19
BAB III     AKUNTABILITAS KINERJA .....	21
3.1 Potret Capaian Kinerja .....	21
3.2 Akuntabilitas Keuangan .....	50
3.3 Inovasi Daerah .....	51
3.4 Apresiasi/ Penghargaan .....	56
BAB IV     PENUTUP .....	59

## KATA PENGANTAR

**Om Swastyastu,**



Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata cara Reviu Laporan Kinerja, bahwa paling lambat 3 ( Tiga ) bulan setelah tahun anggaran berakhir, saya selaku Bupati wajib menyusun Laporan Kinerja ( LKJIP ).

Bagi kami di Kabupaten Badung, tahun 2017 adalah tahun pertama dalam upaya mewujudkan Tujuan dan sasaran pembangunan sesuai RPJMD Semesta Berencana 2016-2021. Komitmen kami dalam mewujudkan Visi Pembangunan yaitu “*Memantapkan Arah Pembangunan Badung berlandaskan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat yang Maju, Damai dan Sejahtera*” dihadapkan pada kendala adanya Penataan Organisasi Perangkat Daerah sesuai amanat PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Upaya mewujudkan sasaran strategis dan pengukuran capaian kinerja tahun 2017 belum bisa berjalan optimal karena saat itu perhatian dan sumber daya difokuskan untuk melakukan penataan kelembagaan yang berdampak pula pada keselarasan dokumen perencanaan daerah yang mengharuskan pada saat bersamaan dilakukan Perubahan / Revisi RPJMD untuk menyesuaikan dengan Organisasi Perangkat Daerah yang baru.

Namun demikian, *momentum* Revisi RPJMD kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan upaya perubahan *mindset* dan kinerja organisasi melalui perumusan *Tujuan, sasaran, Indikator dan Target Kinerja* yang terukur, sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang *efektif, efisien, akuntabel* dan berorientasi pada hasil ( *result oriented* ).

Dengan kondisi seperti tersebut diatas, maka tahun 2017 diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh bagi Pemerintah Kabupaten Badung dalam membangun *Manajemen Kinerja* dan *Sistem Akuntabilitas Kinerja* melalui upaya penyalarsan dokumen Perencanaan daerah, Perencanaan Perangkat Daerah ( Renstra ), perubahan *mind set* untuk membangun *etos kerja, budaya kinerja* dan program *inovatif*. Disamping melakukan Revisi RPJMD, upaya perubahan menuju budaya kinerja yang telah dilakukan antara lain melalui kebijakan kewajiban menandatangani *Fakta Integritas* oleh seluruh ASN dan Perangkat Desa, *Perjanjian Kinerja* sampai eselon IV, Penyusunan *Rencana Aksi, Cascading Kinerja, Cross Cutting Program, e-Lakip* serta penerapan *Reward dan Punishment* melalui “*Mangupura Awards*” dan *sistem e-Kinerja* yang mulai diterapkan tahun 2018.

Upaya peningkatan tata kelola pemerintahan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Kabupaten Badung mulai dirasakan manfaatnya hal ini tampak dari perubahan *mindset* dan disiplin ASN sebagai tuntutan dari budaya kinerja yang lambat laun mulai tumbuh dan akan terus kami dorong serta *efisiensi* anggaran sebagai akibat adanya penyalarsan program / kegiatan dengan sasaran RPJMD.

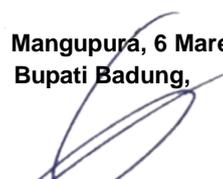
Mengingat RPJMD Semesta Berencana 2016 – 2021 baru ditetapkan pada bulan Agustus 2017, maka upaya pencapaian sasaran strategis belum bisa dilakukan secara optimal namun dari 20 sasaran dengan 21 Indikator Kinerja Utama secara umum capaian kinerjanya sesuai target yang ditetapkan tetapi ada beberapa indikator kinerja yang baru ditetapkan, belum bisa diukur hasilnya seperti Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Kebahagiaan karena masih dalam proses kerjasama dengan BPS dan Kementerian Agama sehingga mulai tahun 2018 dipastikan IKU tersebut sudah bisa dilaporkan setiap tahun.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami menyampaikan Apresiasi dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam mewujudkan Akuntabilitas Kinerja khususnya kepada jajaran Kementerian PAN dan RB atas perhatian dan pembinaannya selama ini sehingga Pemerintah Kabupaten Badung mampu meraih predikat AKIP BB ( 77,53), selanjutnya dengan komitmen dan kerja keras, kami bertekad untuk bisa meraih predikat AKIP A. SEMOGA.

Sekian dan Terima kasih

**Om Santih, Santih, Santih, Om**

Mangupura, 6 Maret 2017  
Bupati Badung,

  
NYOMAN GIRI PRASTA

## SEJARAH SINGKAT KOTA MANGUPURA



Pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung di Mengwi dilatarbelakangi oleh proses pemekaran Kabupaten Badung menjadi dua wilayah yaitu Kabupaten Badung dan Kota Madya Denpasar pada tahun 1992. Pemekaran tersebut secara faktual telah menyebabkan di wilayah Denpasar saat itu terdapat dua pusat pemerintahan yaitu Kabupaten Badung dan Kota Madya Tingkat II Denpasar ( kini Kota Denpasar ) yang pembentukannya ditetapkan dengan UU Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar. Berdasarkan kondisi tersebut, lalu muncul pemikiran untuk memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Badung saat itu *Dharma Praja* yang berada di kawasan Lumintang Denpasar ke wilayah Kabupaten Badung.



Sejak lepasnya Kota Denpasar dari Kabupaten Badung, segala urusan administrasi pemerintahan di Kabupaten Badung tidak terkonsentrasi di satu tempat, hal tersebut berdampak kurang efektif dan efisiennya urusan manajemen pemerintahan. Keberadaan wilayah Kabupaten Badung yang memanjang dari utara ke selatan dan ditengah-tengah telah menjadi bagian wilayah kota Denpasar, memerlukan adanya pusat pemerintahan yang terfokus pada satu lokasi yang strategis sehingga memudahkan dalam komunikasi, koordinasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam perjalanan selanjutnya, rencana pembangunan pusat pemerintahan ditetapkan lokasinya di Kelurahan Sempidi dengan luas lahan 46,677 hektar. Berdasarkan rekomendasi DPRD Kabupaten Badung nomor : 100/662/DPRD tanggal 19 Oktober 2001 tentang rekomendasi Penetapan lokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung yang kemudian ditetapkan melalui Keputusan Bupati Badung Nomor 1269 tahun 2001 tentang Penetapan Lokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Peristiwa yang bersejarah tersebut terjadi pada masa pemerintahan Bupati Badung A.A.Ngurah Oka Ratmadi,SH.

Ada beberapa alasan dipilihnya Mengwi sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Badung antara lain :

1. Mengwi adalah suatu pusat pemerintahan dari jaman kerajaan yang raja-raja keturunan Majapahit mempunyai gaya dan bentuk kota yang khas.
2. Mengwi mempunyai warisan budaya Taman Ayun yang juga telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia.

3. Mengwi merupakan pusat ( *catuspatha* ) atau titik nol pusat pemerintahan Badung yang secara spiritual terletak di Pura Sad Kahyangan yakni Pura Pucak Mangu ( gunung ) dan Pura Uluwatu ( laut ) hal ini sesuai dengan konsep *Nyegara Gunung*.



Membangun Pusat Pemerintahan yang representative memang tidak mudah, beberapa kali dilakukan revisi dan penyempurnaan *DED*. Bupati Badung saat itu Anak Agung Gde Agung, SH menginginkan bagaimana Puspem Badung menonjolkan kearifan lokal termasuk dalam pemilihan bahan bangunan, nuansa Bali yang berlandaskan ajaran agama Hindu dengan menggunakan filsafat *Tri Mandala* yang terdiri atas *Utama Mandala*, *Madya Mandala*, *Nista Mandala* ( *hulu, tengah, teben* ).

Nama *Mangupura* tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya dari nama Mengwi. Secara etimologis, *Mangupura* berasal dari dua kata *Mangu* yang berarti merenung atau *semadi* dan *Pura* yang berarti Kota, maka secara harfiah *Mangupura* dapat diartikan sebagai kota tempat merenung ( *semadi* ). Berbicara soal *semadi*, merujuk pada adanya suatu tempat yaitu Puncak Mangu ( bukit pengelangan ) ditempat tersebut I Gusti Agung Putu yang menjadi cikal bakal Raja – Raja Mengwi bersemadi memohon restu agar diberkahi keberhasilan dalam menundukan lawan-lawannya. Berkat petunjuk Beliau yang bersthana di Puncak Mangu, permohonannya dikabulkan dan sebagai tanda kemenangan, maka dibangunlah sebuah kota untuk dijadikan pusat aktivitas yang diberi nama “*Mangupura*”.

Ada kemungkinan lain, bahwa *Mangupura* berasal dari *Mangopuri* yang artinya “tempat yang indah” adalah salah satu tempat yang menjadi pilihan *dharmayatra* Dang Hyang Nirarta pada abad 15/16 Masehi. Dua abad kemudian, tempat itulah yang muncul dalam *semadi* I Gusti Agung Putu di Puncak Mangu, maka dipilihlah sebuah tempat sebagai pusat kerajaan sekaligus ibu kota yang diberi nama “*Mangopura*” yang artinya kota yang indah. *Mangupura* juga disebut *Kawayapura* berasal dari kata *Kawya* = *Mango* berarti karangan atau buatan dan *pura* yang berarti kota. *Kwayapura* atau *Mangopura* kurang lebih dapat diartikan sebagai sebuah kota yang dengan sengaja dibangun untuk dijadikan pusat pemerintahan dengan batas-batasnya yang jelas sebagai banteng kerajaan.

Bertolak dari uraian diatas, jelaslah bahwa nama *Mangupura* sudah pernah mengumandang menjadi *ikon* sebuah kerajaan yang memiliki posisi tawar sejajar dengan kerajaan lain di Bali yang bernaung dibawah panji-panji kerajaan *Semarapura*. Lebih dari 200 tahun ikut berperan di panggung sejarah Bali, kini *Mangupura* yang kedengaran begitu indah, dahulu digunakan untuk menyebut sebuah tempat ibu kota kerajaan, diluar dugaan bangkit kembali dijadikan ibu kota kabupaten yaitu Kabupaten Badung.

Tanda –tanda bangkitnya kembali *Mangupura* sebagai ibu kota Kabupaten Badung sesungguhnya tidak ada yang kuasa menebaknya, walaupun berbagai fenomena yang tampak

dipermukaan seperti : pemecahan Kabupaten Badung menjadi Kota Denpasar dan Kabupaten Badung tahun 1992, terbakarnya Puspem Kabupaten Badung di Lumintang tahun 1999, tampilnya Anak Agung Gde Agung dari Puri Mengwi sebagai Bupati Badung, dipilihnya Mengwi sebagai pusat pemerintahan, semuanya itu sebagai pembuka jalan bagi kembalinya Mangupura sebagai ibu kota Kabupaten Badung.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2009 tentang Pemindahan ibu kota Kabupaten Badung dari wilayah Kota Denpasar ke wilayah Kecamatan Mengwi, ibu kota Kabupaten Badung berkedudukan di wilayah Kecamatan Mengwi yang meliputi 9 ( Sembilan ) desa / kelurahan yaitu : Desa Mengwi, Desa Gulingan, Desa Mengwitani, Desa Kekekan, Kelurahan Kapal, Kelurahan Abianbase, Kelurahan Lukluk, Kelurahan Sempidi dan Kelurahan Sading, maka pada tanggal 16 Nopember 2009 Mangupura resmi menjadi ibu kota Kabupaten Badung yang ditanda tangani Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan diresmikan pada tanggal 12 Pebruari 2010 oleh Menteri Dalam Negeri H.Gamawan Fauzi.

Kini Mangupura telah menjadi pusat pemerintahan yang sangat representative dan terintegrasi. Disamping sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan public, Mangupura dengan pusat perkantoran Mangupura Mandala juga menjadi tempat aktivitas seni, budaya dan keagamaan bukan saja bagi umat Hindu yang merupakan mayoritas, tetapi juga bagi umat lainnya seperti Islam, Kristen, Buda dan sebagainya sehingga menjadi symbol kuatnya toleransi antar umat di Kabupaten Badung, sebagai tempat rekreasi dan olah raga bagi masyarakat serta telah dikunjungi ribuan tamu dari berbagai daerah di Indonesia dan terakhir tentunya diharapkan dapat menjadi tempat pelayanan publik kebanggaan kita semua. ( dikutip dari : *Buku Mangupura Ibu Kota Kabupaten Badung, diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung tahun 2011* ).

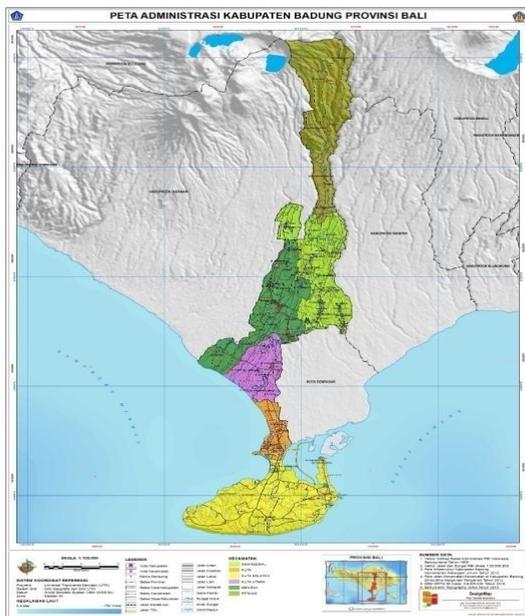


Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Mangupura Mandala

**BAB I PENDAHULUAN**

**1.1 TENTANG KABUPATEN BADUNG**

**- GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS**



Badung merupakan salah satu kabupaten / kota di provinsi Bali yang memiliki luas 418,52 km<sup>2</sup> atau sekitar 7,43 persen luas wilayah provinsi Bali dan terletak dibagian paling selatan dari pulau Bali. Secara administrative, Kabupaten Badung berbatasan dengan dengan Kabupaten Buleleng di sebelah utara, Kabupaten Gianyar, Bangli dan Kota Denpasar di sebelah Timur, Kabupaten Tabanan disebelah Barat serta Samudera Indonesia di sebelah Selatan, terbagi atas 6 wilayah kecamatan dan 62 desa/kelurahan. Dari seluruh kecamatan yang ada, kecamatan Petang merupakan kecamatan terluas dengan luas 115 Km<sup>2</sup> sedangkan kecamatan Kuta merupakan kecamatan yang terkecil dengan luas wilayah 17,52 km<sup>2</sup>.

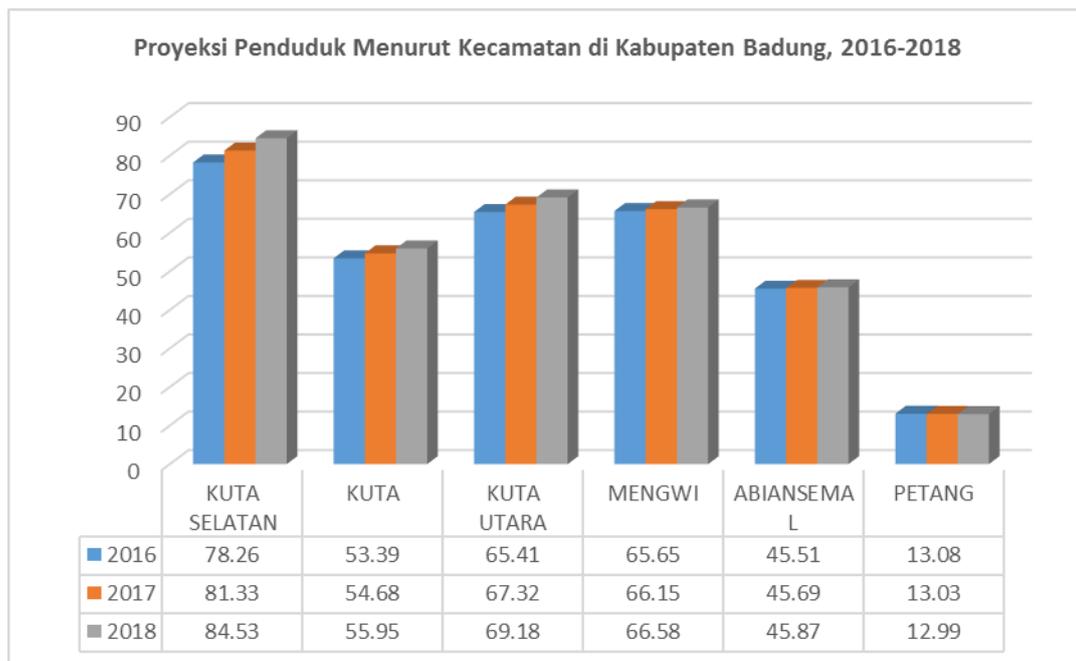
Disamping memiliki desa/kelurahan yang sering disebut desa dinas, terdapat 122 desa adat, 531 Banjar adat dan Sekaa Teruna yaitu kelompok pemuda dan pemudi yang bernaung dibawah desa adat sebagai bentuk kearifan local. Keberadaan desa dinas dan desa adat selama ini berjalan harmonis karena memiliki fungsi yang berbeda dimana desa dinas melayani administrasi kedinasan sedangkan desa adat khusus melaksanakan fungsi pelestarian adat, agama dan budaya.

- Demografi :  
Sampai dengan data semester I tahun 2018, jumlah penduduk Kabupaten Badung sebanyak 474.198, yang terdiri dari **235.562** jiwa penduduk laki-laki dan **238.636** jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk paling banyak terdapat di kecamatan Mengwi yaitu sebanyak 120.613 jiwa atau 25,43 persen dari total penduduk Kabupaten Badung sementara kecamatan Petang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu 33.743 jiwa atau 47.11 persen.

***Luas Wilayah, dan data penduduk tahun 2017 per kecamatan***

Kecamatan/Desa	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
I. Kuta Selatan	101,13	49.021	48.908	97.929
II. Kuta	17,52	27.290	26.399	53.689
III. Kuta Utara	33,86	38.057	38.549	76.606
IV. Mengwi	82,00	60.139	60.474	120.613
V. Abiansemal	69,01	45.565	46.053	91.618
VI. Petang	115,00	15.490	18.253	33.743
<b>Jumlah</b>	<b>418,52</b>	<b>235.562</b>	<b>238.636</b>	<b>474.198</b>

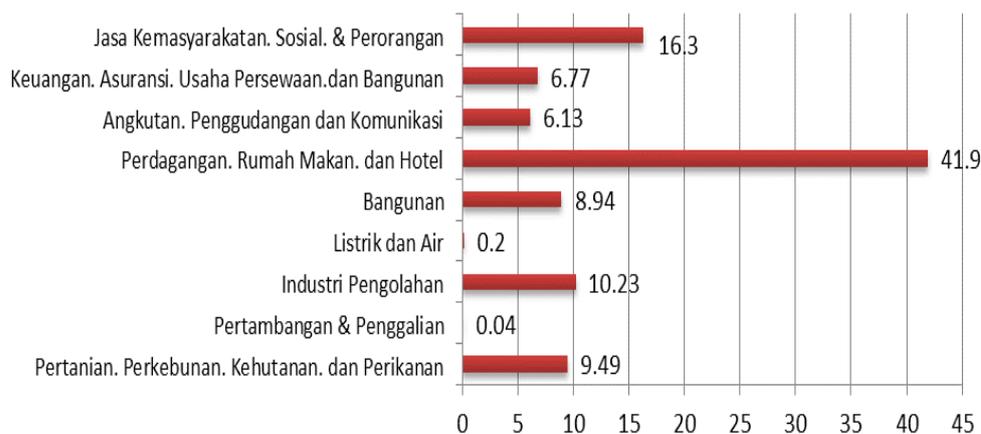
Sumber : Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung



**- KETENAGAKERJAAN**

Apabila dilihat dari perkembangan penduduk berdasarkan penyerapan sector lapangan usaha tahun 2016, secara kumulatif penyerapan paling banyak berada pada sector perdagangan, rumah makan dan hotel. Penyerapan tenaga kerja pada sector ini sebanyak 141.975 orang atau 41,90 persen dari jumlah tenaga kerja keseluruhan kabupaten Badung.

**Prosentase (%) Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Badung Tahun 2016**



Sumber : Sumber: SIPD Kabupaten Badung Tahun 2017

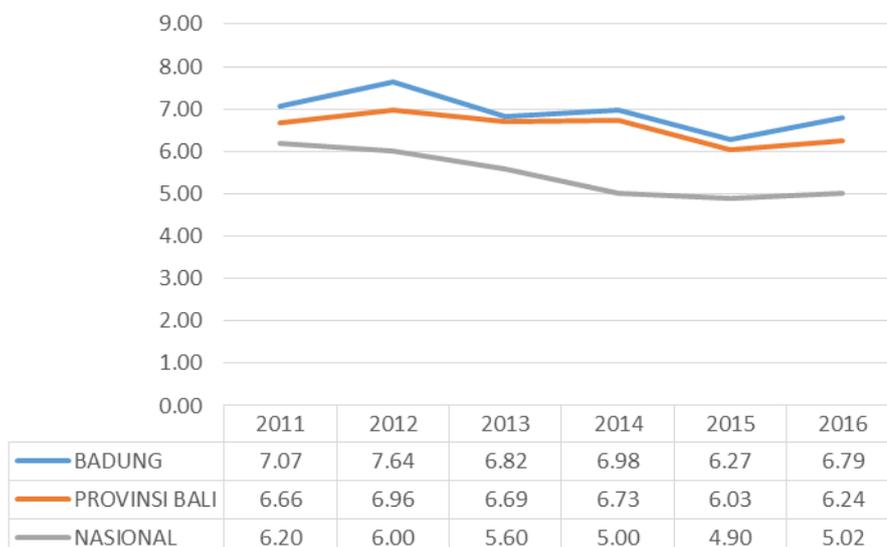
- **Perekonomian daerah :**



Kontribusi terbesar PDRB Kabupaten Badung pada tahun 2016 pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 28,16 persen menurun bila dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 28,48 persen. Selanjutnya disusul sector transportasi dan pergudangan sebesar 25,75 persen meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2015 hal ini karena Badung sebagai daerah tujuan wisata dunia.

Laju pertumbuhan PDRB selama 4 tahun terakhir berkisar pada angka pertumbuhan 7 persen. Pada tahun 2016 sebesar 6,79 persen, tahun 2015 sebesar 6,27 persen, tahun 2014 sebesar 6,98 persen dan tahun 2013 sebesar 6,82 persen.

Secara agregat PDRB atas dasar harga berlaku dan atas harga konstan mengalami peningkatan. PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2016 sebesar Rp. 67,14 juta sedangkan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp. 49,46 juta. Indikator lainnya yang sering dijadikan acuan adalah pertumbuhan ekonomi.



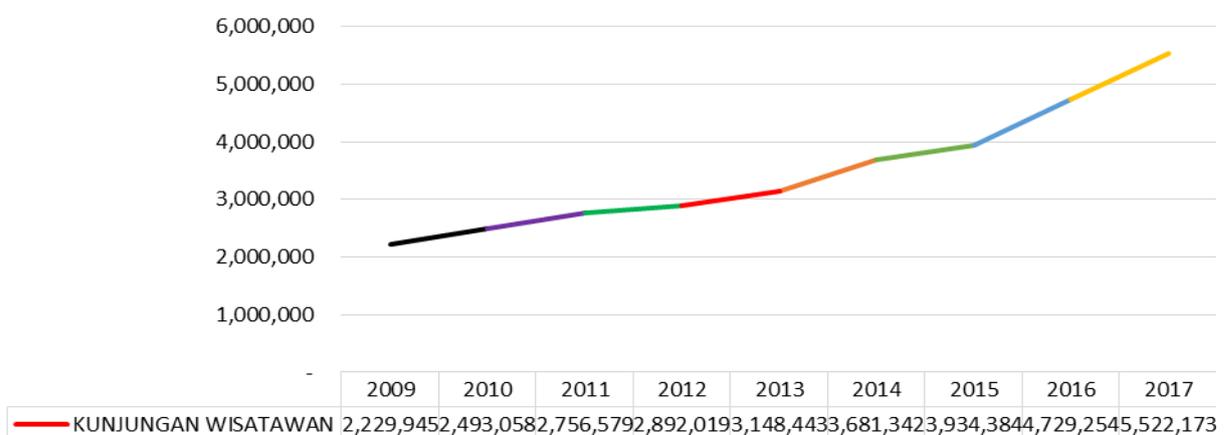
Sumber: BPS Badung dan BPS Bali

- **Kepariwisataan :**

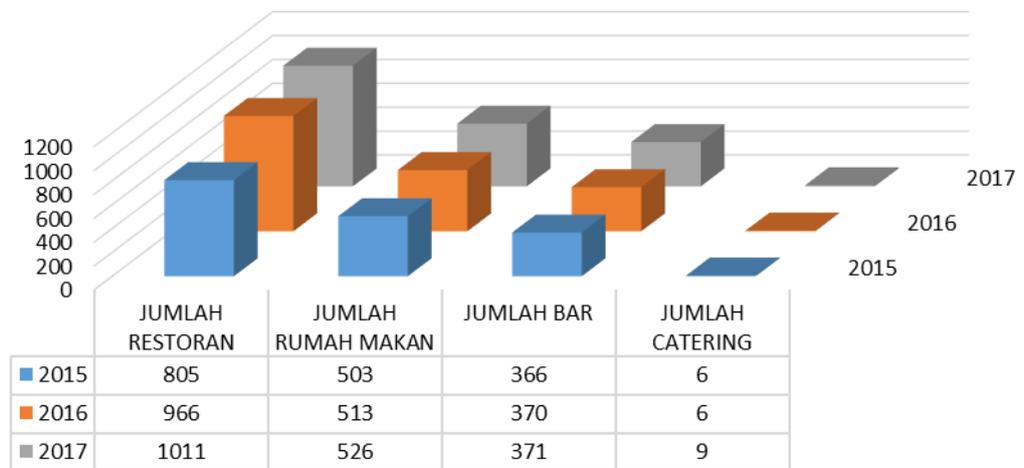


Kabupaten Badung merupakan pusat pengembangan dan tujuan wisata di Bali, karena memiliki banyak kawasan wisata yang sudah terkenal di manca Negara. Kabupaten Badung memiliki 26 obyek wisata yang dikunjungi ribuan wisatawan setiap tahunnya. Berikut dapat Dari Grafik berikut terlihat peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung dari Tahun 2009 – 2017 sebagai berikut:

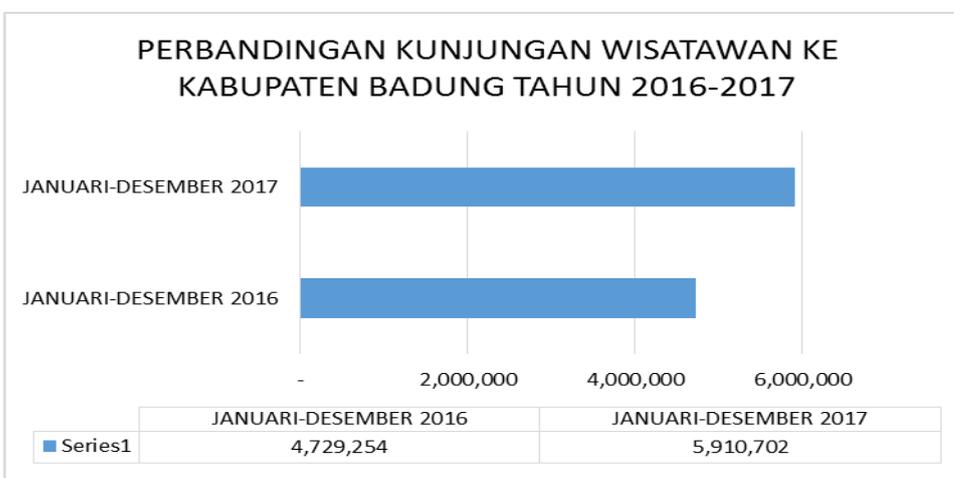
**KUNJUNGAN WISATAWAN KE KABUPATEN BADUNG TAHUN 2009-2017**



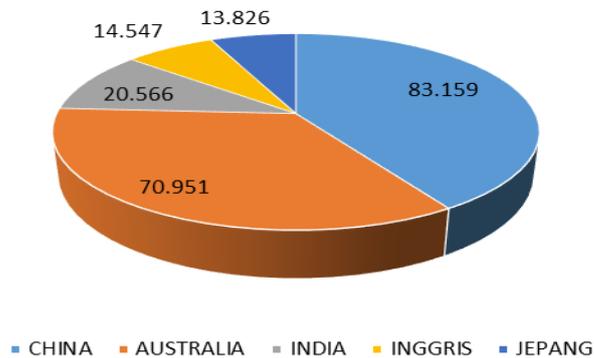
**JUMLAH RESTORAN, RUMAH MAKAN, BAR DAN CATERING DI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015-2017**



**PERBANDINGAN KUNJUNGAN WISATAWAN KE KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016-2017**



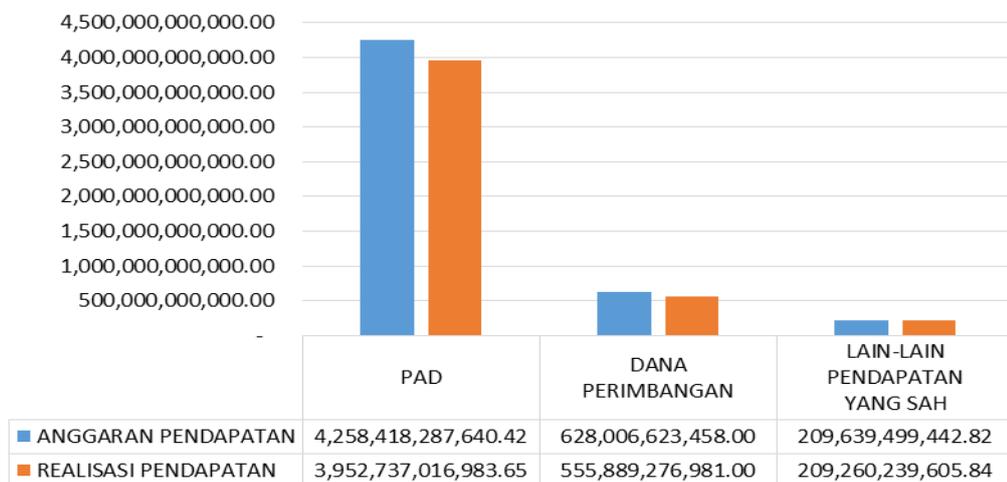
5 BESAR NEGARA YANG BERKUNJUNG KE KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017



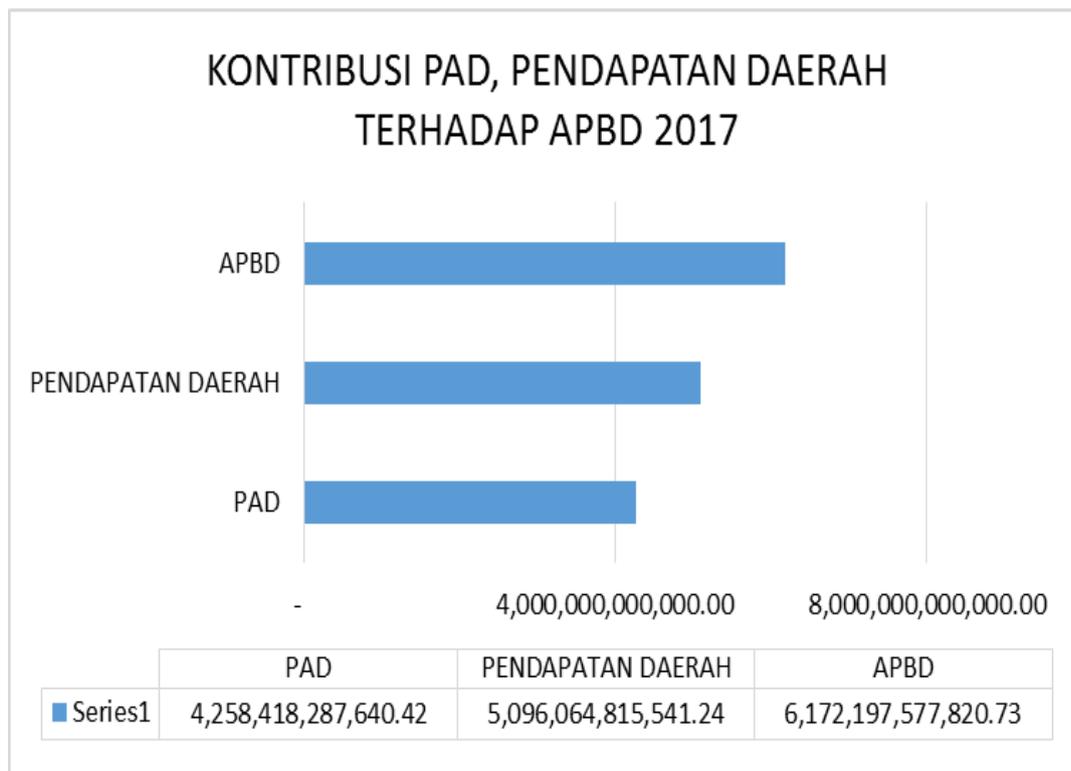
- **Pendapatan Asli Daerah :**

Sektor pariwisata telah menjadi andalan dalam menggerakkan APBD melalui Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak hotel dan restoran serta menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi.

REKAPITULASI REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017



Data : Bapenda Kab.Badung



**PERBANDINGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2013 – 2018**

No	Tahun	Total Pendapatan	PAD	%
1	2013	2.718.030.317.564,08	2.029.161.138.232,59	74,66
2	2014	3.155.737.140.907,51	2.475.804.904.020,18	78,45
3	2015	3.627.734.540.239,40	2.832.034.079.488,77	78,07
4	2016	3.948.077.205.756,84	3.195.340.365.380,70	80,93
5	2017	5.096.064.815.541,24	4.258.418.287.640,42	83,56
6	2018	6.567.483.603.537,47	5.700.510.789.575,06	86,80

Sumber: BPKAD Kab. Badung

## 1.2 ISU STRATEGIS

Dalam rangka untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan pengembangan sektor kepariwisataan secara umum ada beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian :

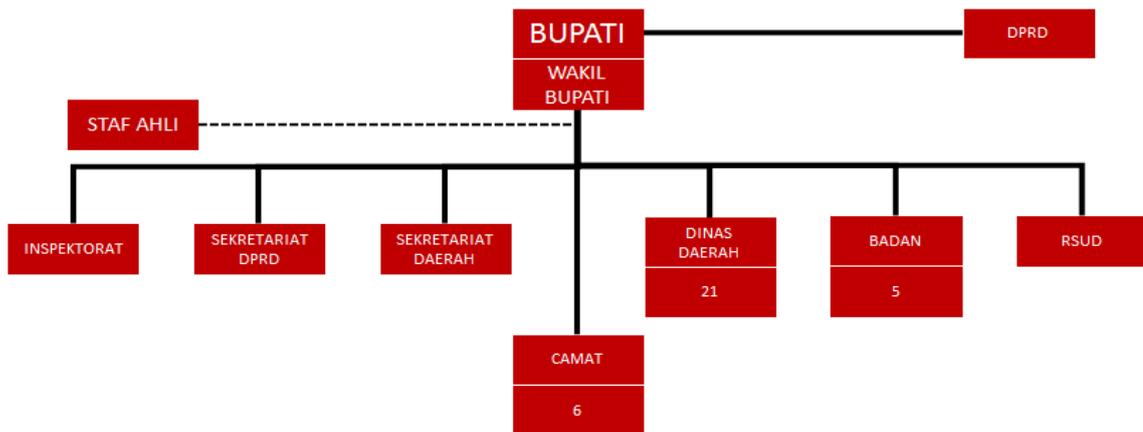


### - KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH



Sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya berkenaan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan

pilihan yang menjadi kewenangan kabupaten, serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mencerminkan kapasitas daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan sesuai potensi daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Ini dilakukan penataan kelembagaan perangkat daerah dengan mengacu prinsip efektivitas dan efisiensi serta Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Dibandingkan tahun 2016, jumlah Perangkat Daerah mengalami pengurangan dari 53 menjadi 38 Perangkat Daerah yang terdiri dari 21 Dinas, 7 badan, 2 sekretariat, 1 Inspektorat, 6 kecamatan dan RSUD.



### 1.3 ARAH KEBIJAKAN

#### Membangun Pariwisata Berbasis Budaya

Wisatawan yang berkunjung ke kabupaten Badung dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan disamping karena keindahan alam juga terpesona kehidupan masyarakatnya yang terkenal ramah serta menyaksikan aktivitas adat, seni, budaya dan ritual keagamaan yang unik serta suasana pedesaan dan panorama pantai berpasir putih yang menjadi ikon pariwisata Bali di mata wisatawan.

Pemerintah Kabupaten Badung mengembangkan industry pariwisata yang berbasis budaya didukung dengan potensi wilayah serta keterlibatan masyarakat untuk mewujudkan kepariwisataan yang berkelanjutan. Dalam konsep pembangunan kepariwisataan Badung, ada 4 pilar yang dijadikan panduan :

1. Destinasi , mengembangkan kawasan Badung utara sebagai desa wisata yang berbasis agrowisata yang berkualitas dan mengembangkan kawasan Nusa Dua sebagai destinasi MICE internasional didukung daya tarik wisata pantai dan bahari; Industry, mengembangkan industry pariwisata yang berdaya saing global melalui peningkatan kualitas produk, layanan dan kepedulian terhadap lingkungan hidup, social dan budaya.
2. Mewujudkan investasi dibidang industry pariwisata secara selektif dengan prioritas pengembangan usaha kecil menengah dengan mempertimbangkan daya dukung kawasan.
3. Pemasaran, mengembangkan pemasaran yang inovatif untuk meningkatkan jumlah kunjungan, lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada pariwisata, masyarakat dan pemerintah;
4. Kelembagaan, mewujudkan kawasan pariwisata yang terintegrasi dan berbasis masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional;

**OBJEK PARIWISATA  
DI KABUPATEN BADUNG**



**PURA TAMAN AYUN**



**PERKEBUNAN DESA PLAGA**



**PANTAI DREAM LAND**



**PANTAI KUTA**

Sektor kepariwisataan di Kabupaten Badung telah diakui sebagai lokomotif pembangunan ekonomi yang menyumbang Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) sector pariwisata dianggap sebagai pemantik untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan manfaat yang signifikan dibidang ekonomi, social budaya dan lingkungan serta memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat local untuk meningkatkan kesejahteraan.

Membangun kepariwisataan agar dapat berkelanjutan sangat ditentukan oleh pandangan kedepan dan kebijakan (forward looking Policies) dan filosofi manajemen yang mampu membangun hubungan harmonis antara masyarakat local, sector usaha swasta dan pemerintah. Keharmonisan tersebut berkaitan dengan praktek-praktek pembangunan guna meningkatkan manfaat ekonomi yang selaras dengan perlindungan terhadap alam, social budaya sehingga kehidupan masyarakat local maupun destinasi dapat meningkat kualitasnya.



Pembangunan Pariwisata Berbasis Budaya

Pembangunan kepariwisataan membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholders serta kepemimpinan politik yang kuat untuk memastikan adanya partisipasi yang luas dalam membangun consensus bersama secara terus menerus dan membutuhkan monitoring terhadap dampak yang ditimbulkannya. Secara filosofis pembangunan kepariwisataan membutuhkan perencanaan induk yang mempunyai peranan yang strategis dalam menjamin keberlanjutan penyelenggaraan kepariwisataan.

Paradigma baru kepariwisataan di Kabupaten Badung yang berbasis pada keserasian antara manfaat ekonomi dengan keseimbangan antara lingkungan social dan budaya. Paradigma baru memandang pariwisata sebagai salah satu sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dengan tidak mengorbankan aspek lainnya yang bersifat eksploitatif, namun dilakukan pendekatan yang komprehensif dari hulu sampai ke hilir yaitu fase berkembang dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maupun pemerintah sejalan dengan konsep pembangunan berlandaskan Tri Hita Karana.



Air Terjun Nung-Nung



Pantai Melasti



Pantai Uluwatu



Water Blow Nusa Dua

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, efektif dan efisien serta akuntabel, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, berpedoman pada dokumen perencanaan antara lain :

### 2.1 RPJMD SEMESTA BERENCANA 2016-2021

RPJMD Semesta Berencana 2016-2017 ditujukan untuk melanjutkan kembali kemajuan pembangunan daerah , dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk dapat menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Badung dalam lima Tahun kedepan telah dirumuskan Visi Kabupaten Badung sebagai berikut :



Dalam upaya mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, efektif, efisien serta membangun akuntabilitas kinerja yang semakin baik, maka Tujuan, Sasaran dan Indikator kinerja utama (IKU) dalam RPJMD Semesta Berencana 2016-2021 telah dirumuskan secara terukur dan akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD semesta berencana 2016-2021, telah ditetapkan 5 program prioritas sebagai penjabaran pola pembangunan nasional semesta berencana (PPNSB) sebagai berikut:



## 2.2 . Perjanjian Kinerja



Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu

satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward dan punishment.

Perjanjian kinerja tahun 2017 disusun mengacu pada Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja sesuai RPJMD Semesta Berencana tahun 2016 – 2021, dan telah ditetapkan pada tanggal 26 September 2017 sebagai berikut :

**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4	5.
Visi : <b>“MEMANTAPKAN ARAH PEMBANGUNAN BADUNG BERLANDASKAN TRI HITA KARANA MENUJU MASYARAKAT YANG MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA”</b>				
<b>Misi ke-satu:</b> <b>Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat,budaya dan agama</b>				
1.	Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya	1. Meningkatnya toleransi hidup beragama	1. Indek kerukunan umat beragama	81,6
		2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	2. Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	48%
<b>Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi</b>				
2.	Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	3. Indeks kepuasan masyarakat	78
<b>Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government</b>				
3.	Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional	4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	4. Katagori akuntabilitas kinerja kabupaten	76,55 (BB)
		5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	5. Opini BPK	<b>WTP</b>
		6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	6. Katagori penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)	B
<b>Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan</b>				
4.	Meningkatnya kualitas SDM dan menurunnya angka kemiskinan dalam	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	7. Indeks pembangunan manusia	80,3

	masyarakat	8. Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	8. Indek Kebahagiaan	-
		9. Menurunnya angka kemiskinan	9. Persentase penduduk miskin	2,30-2,25%
<b>Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan</b>				
5.	Menguatnya UMKM dalam menunjang perekonomian kerakyatan	10. Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	10. Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	7,73%
<b>Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)</b>				
6.	Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda dan Perkada	11. Meningkatnya Pencegahan Pelanggaran Perda dan Perkada	11. Persentase pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	80%
		12. Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	12. Persentase penegakan Perda dan Perkada	75%
7.	Terwujudnya Pengarusutamaan Gender	13. Meningkatnya Pengarusutamaan gender	13. Indeks pembangunan gender (PG)	75.61
<b>Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan Penanggulangan Bencana</b>				
8.	Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	14. Indek kualitas lingkungan hidup	65.90
			15. Indeks pertanaman	185
9.	Terwujudnya Penanggulangan bencana secara terpadu	15. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	16. Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Level 4
<b>Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah</b>				
10.	Terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing	16. Meningkatnya daya saing tenaga kerja	17. Tingkat pengangguran terbuka	0.335%
11.	Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	18. Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	97.50%
<b>Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian dan perikanan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya</b>				
12.	Meningkatnya ketersediaan pangan	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	19. Skor pola pangan harapan	93.50
13.	Meningkatnya daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor Pertanian dan Perikanan	19. Meningkatnya daya Tarik wisata yang berdaya saing	20. Persentase daya Tarik wisata yang berdaya saing	64%
		20. Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	21. Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	28.17

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 POTRET CAPAIAN KINERJA



Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Bupati secara efektif serta dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja, telah dilakukan penyesuaian terhadap Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja untuk mengarahkan agar program pembangunan daerah dapat difokuskan untuk mencapai sasaran strategis secara efisien serta semakin memacu keberhasilan pembangunan di Kabupaten Badung yang dilandasi dengan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel.

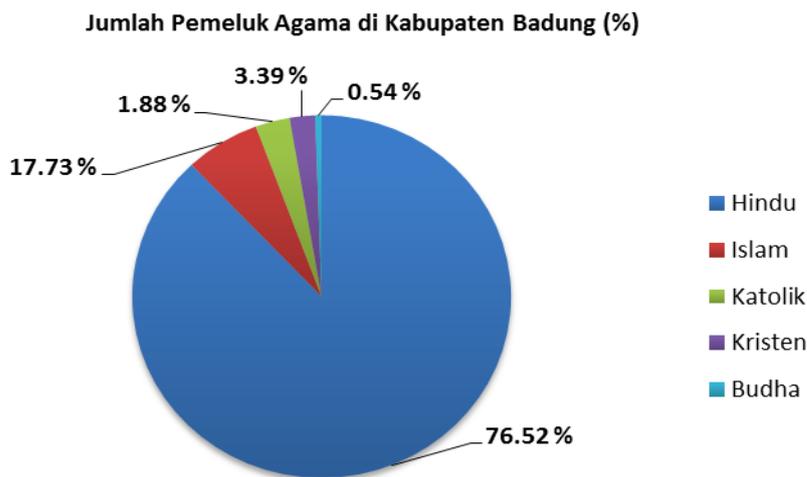
Dari beberapa Indikator Kinerja Utama yang baru ditetapkan, capaian kinerja pada tahun 2017 belum semua dapat diukur dan dilaporkan mengingat upaya penyempurnaan indicator dan revisi RPJMD melalui proses yang panjang sehingga upaya untuk mengukur capaian kinerjanya baru akan dilaksanakan tahun 2018. Secara umum capaian indicator kinerja sasaran sesuai RPJMD 2016-2021 memiliki progress yang semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya namun tidak bisa dipungkiri ada capaian kinerja yang progressnya perlu lebih dipacu lagi karena memang mengalami dinamika permasalahan yang cukup tinggi.

Terdapat 2 indikator yang capaian kinerjanya belum bisa dilaporkan tahun 2017 yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Kebahagiaan namun dapat dipastikan tahun 2018 sudah ada hasilnya karena kami sudah melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama dan BPS, selain itu ada beberapa indikator yang capaiannya belum dirilis secara resmi oleh BPS dan BPK RI. Untuk jelasnya capaian sasaran strategis Kabupaten Badung tahun 2017 sebagai berikut :

**SASARAN MENINGKATNYA TOLERANSI HIDUP BERAGAMA**

Bagi Kabupaten Badung yang mengandalkan sektor kepariwisataan suasana toleransi kehidupan beragama perlu terus dijaga, oleh karena itu sasaran ini menjadi sangat penting artinya. Sasaran meningkatnya toleransi hidup beragama dengan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2017 ditargetkan 81.6. Namun capaian kinerja belum bisa dilaporkan karena BPS belum secara khusus melakukan survey atas Indikator ini di Kabupaten Badung, namun sebagai perbandingan Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali tahun 2017 adalah 81,5. Sebagai bagian dari Bali, Kabupaten Badung setidaknya ikut memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Indeks Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Bali mengingat berbagai program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Badung juga turut menciptakan kerukunan antar umat beragama di Bali.

Sebagai pembanding Indeks Kerukunan Umat beragama di Indonesia yang dilakukan oleh Puslitbang dengan kurun waktu 2016 berada diangka 75.47 %, angka tersebut naik 0.11 % ketimbang Tahun 2015, yakni sebesar 75.36 %.



Puja Mandala Cermin Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung

Walaupun terdiri dari berbagai pemeluk agama, toleransi hidup beragama di Kabupaten Badung tetap terjaga dengan baik, tidak ada gesekan, tidak ada intimidasi karena Pemkab Badung sangat mengayomi seluruh umat bahkan Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala terbuka bagi semua umat beragama yang ada di Badung untuk melakukan berbagai aktivitas keagamaan. Serta memberikan perhatian terhadap operasional Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB), pemberian bantuan hibah pembangunan tempat ibadah, serta silaturahmi berupa kunjungan ke masing-masing tempat ibadah.

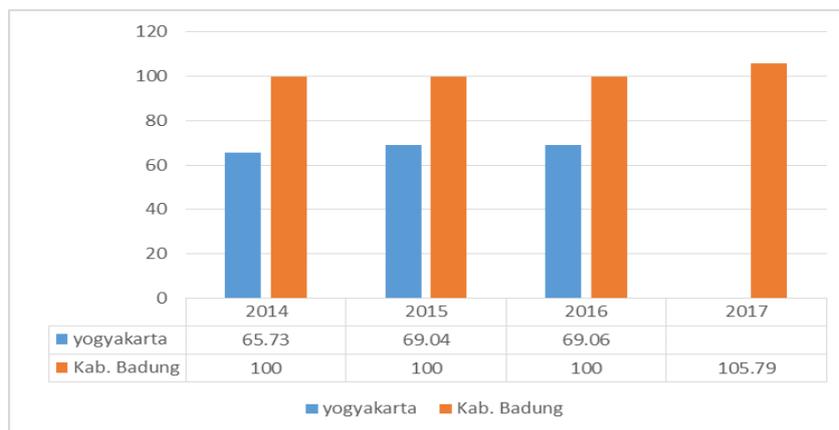


Umat Muslim Melaksanakan Sholat di Kawasan Puspem dengan Nyaman dan Damai

### **Sasaran Meningkatnya Pelestarian adat dan Budaya**

Sebagai pusat pengembangan akomodasi kepariwisataan dan daerah tujuan wisata utama di Bali, gesekan antara budaya asing dengan budaya lokal tidak dapat dihindarkan, oleh karena itu tantangan yang dihadapi dalam pengembangan dan pelestarian budaya kedepan akan semakin berat. Derasnya pengaruh budaya asing baik yang dibawa langsung wisatawan maupun akibat kemajuan teknologi informasi perlu diantisipasi melalui berbagai program dan kegiatan. Penetapan sasaran meningkatnya pelestarian adat dan budaya dengan indikator Derajat Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya diharapkan dapat menumbuhkan sinergitas antara pengembangan pariwisata berbasis budaya dengan pelestarian adat dan budaya masyarakat. Tahun 2017 indikator ini ditargetkan 48% dengan capaian kinerja 50.78% (105.79%) Sampai akhir RPJMD Semesta Berencana 2016-2021, indikator kinerja ini ditargetkan mencapai 90% di akhir periode RPJMD 2016-2021. Upaya untuk mewujudkan sasaran ini dilakukan melalui pembinaan lembaga adat seperti desa adat, sekehe teruna, subak dan kelompok-kelompok kesenian. Sebagai perbandingan derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya di Kabupaten Badung dibanding daerah lain sebagai berikut:

Grafik perbandingan Derajat Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya Prov Yogyakarta dan Kab. Badung Tahun 2014- 2017



Lomba Desa Adat Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pelestarian adat dan budaya



Generasi Muda Perlu diberikan pengetahuan tentang Budaya

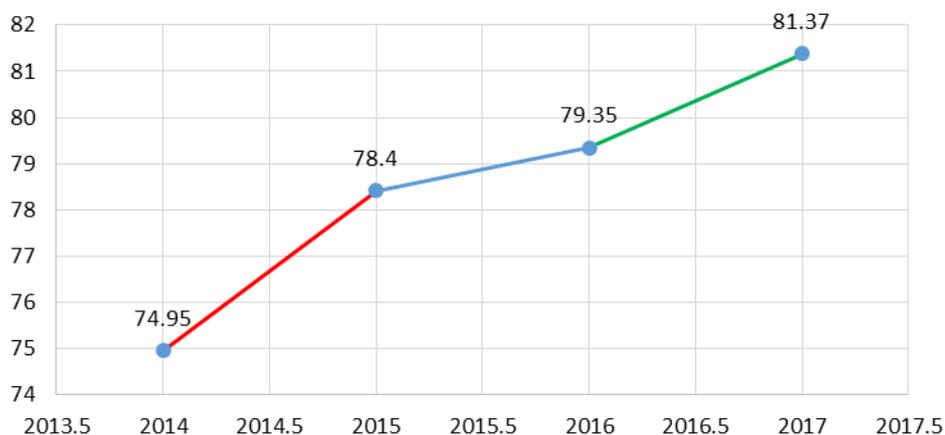


Penyerahan bantuan bibit tanaman kepada anggota subak

### Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Upaya pembangunan fisik yang dilakukan selama ini telah menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan ditandai dengan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana umum. Namun demikian upaya ini perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin baik. Sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan indikator Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atau Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) diharapkan dapat mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, nyaman dan ramah sebagai wujud pelayanan prima. Tahun 2017 target IKM ditetapkan 78 berdasarkan hasil Survey kepuasan masyarakat tahun 2017, IKM Kabupaten Badung mencapai 81.37 atau dengan predikat sangat baik. Hal ini berarti bahwa berbagai program inovatif dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung mendapat apresiasi positif dari masyarakat. Melalui sasaran ini diharapkan mampu mendorong seluruh OPD untuk menumbuhkan dan mengembangkan berbagai program inovatif dalam pelayanan publik. Upaya yang dilakukan melalui pembinaan dan evaluasi bekerjasama dengan ORI dalam upaya meningkatkan kepatuhan terhadap UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KABUPATEN BADUNG TAHUN 2014-2017



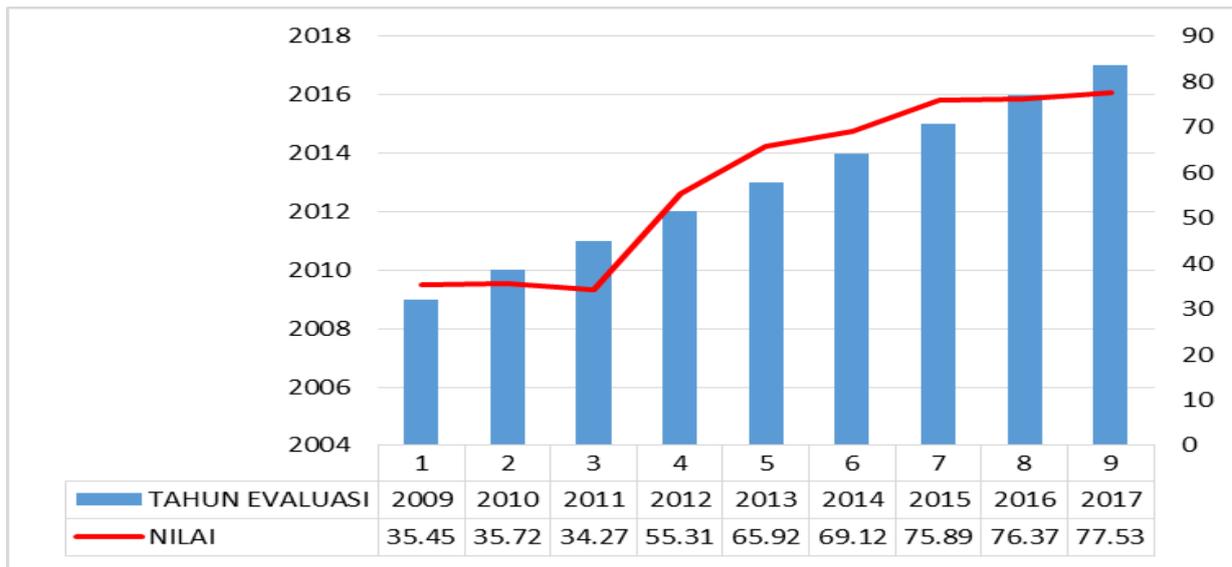
Masyarakat sedang antre pelayanan di RSUD Mangusada Kab. Badung



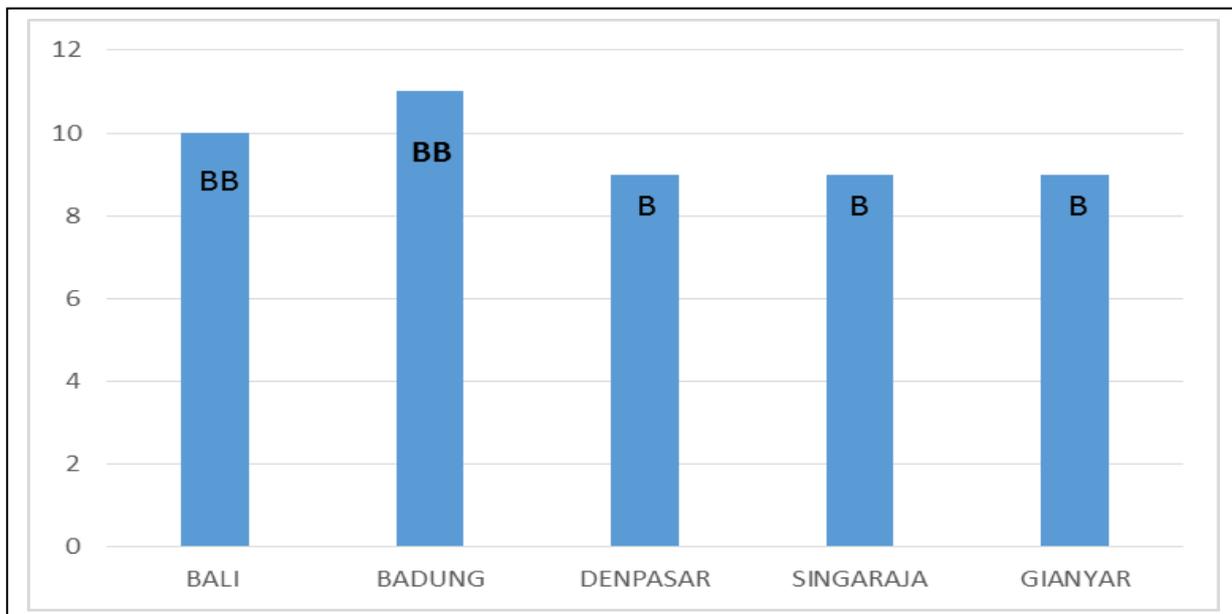
Menteri PAN dan RB RI sedang meninjau Dinas Penanaman Modal dan PTSP

**Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel melalui sasaran meningkatnya akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Indikator kinerja Predikat/kategori Akuntabilitas Kinerja ( AKIP ) guna mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil perlu terus ditingkatkan. Berbagai upaya perbaikan kinerja guna mendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja melalui Revisi RPJMD, penyempurnaan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan penyelarasan dokumen perencanaan serta *refocusing* program melalui *cross cutting* program telah menunjukkan peningkatan kualitas AKIP di Kabupaten Badung, progress ini dapat dilihat dalam table berikut :



Tahun 2017 nilai AKIP Kabupaten Badung ditargetkan 76.55 (BB) sedangkan berdasarkan hasil evaluasi tahun 2017, nilai AKIP mengalami peningkatan menjadi 77,53 (BB) sedangkan sampai akhir periode RPJMD Semesta Berencana 2016-2021 dtargetkan 80,10 (A). Sebagai perbandingan nilai AKIP Kabupaten Kota di Provinsi Bali sebagai berikut :

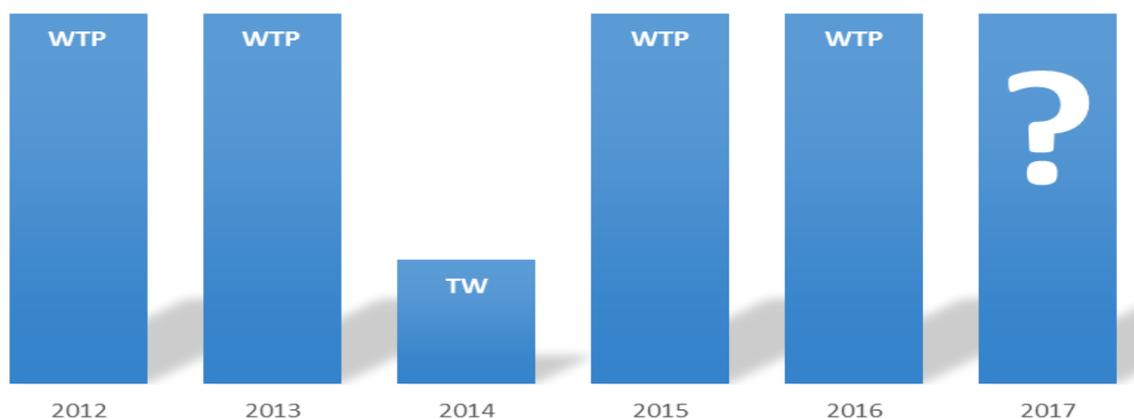




Komitmen untuk meningkatkan penerapan SAKIP mendapat apresiasi yang positif dari Kementerian PAN dan RB RI

### SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH

Pemerintah kabupaten Badung telah tiga kali berturut-turut berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Untuk pemeriksaan tahun 2018 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017 saat ini masih dalam proses audit sehingga capaian kinerja sasaran ini tahun 2017 masih menunggu pengumuman resmi dari BPK RI. Tahun 2017, sasaran ini ditargetkan dapat mempertahankan opini WTP. Sebagai perbandingan capaian kinerja atas sasaran ini dapat dilihat dalam table berikut:



## Sasaran Terwujudnya Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assesement*) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

PMPRB mencakup penilaian terhadap dua komponen: **Pengungkit** (Enablers) dan **Hasil** (Results). *Pengungkit* adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan *Hasil* adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Hubungan sebab-akibat antara Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran, di mana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan. Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan Komponen Hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan. Tahun 2017 Sasaran Terwujudnya Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN dengan indikator Katagori Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Indeks PMPRB) ditargetkan B dengan nilai (65.50) sedangkan untuk kinerja 2017 sampai saat ini belum diumumkan.



Penerapan system Computer Assistent Test (CAT) diharapkan dapat melahirkan ASN yang berintegritas dalam mendukung Reformasi Birokrasi

### Sasaran Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Tahun 2017 IPM Kabupaten badung ditargetkan 80.3 namun sampai laporan ini dibuat BPS belum merilis secara resmi IPM Tahun 2017.

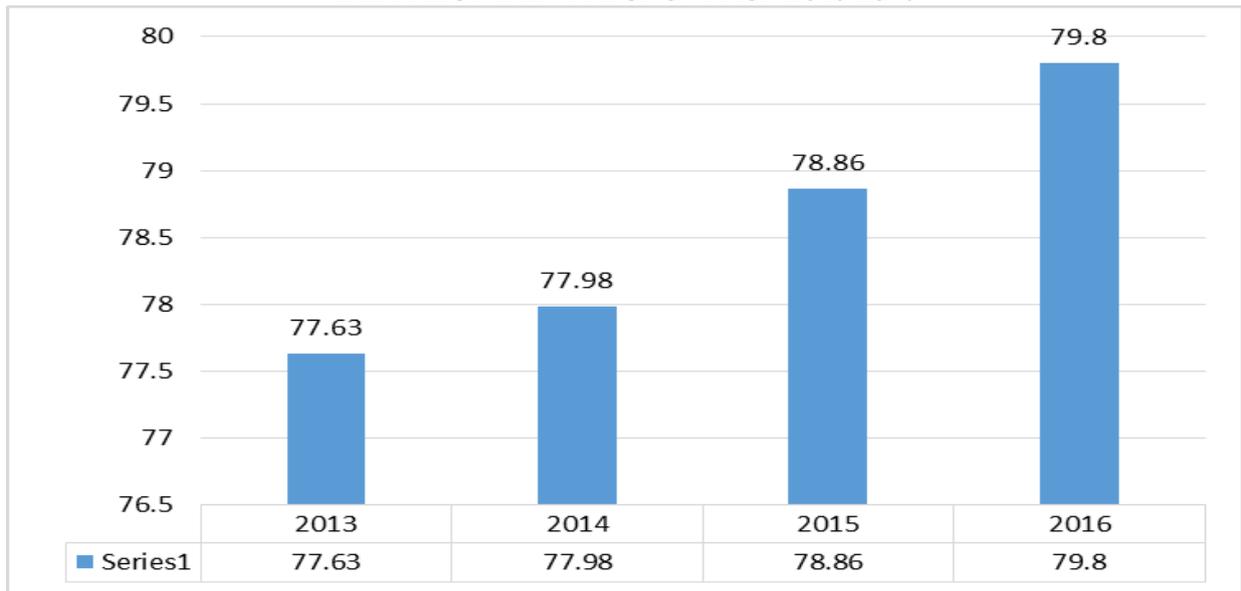


Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan daya beli masyarakat sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Sebagai perbandingan capaian kinerja IPM dari tahun 2013 sebagai berikut:

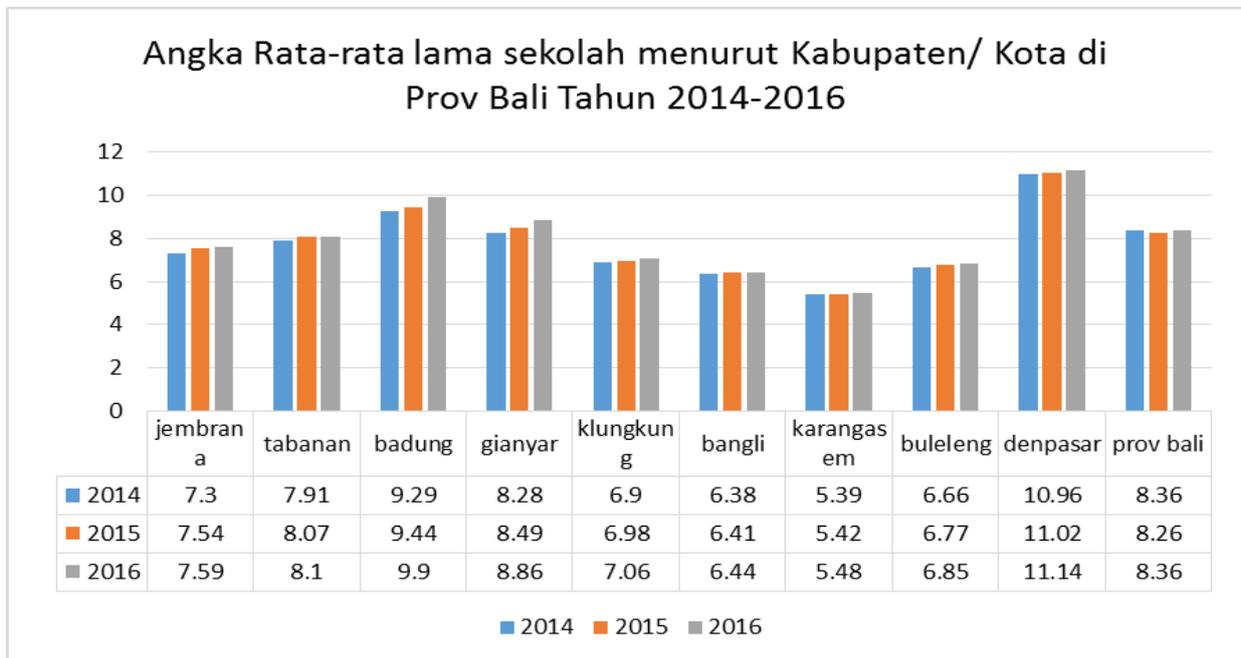
Komponen IPM	IPM Kabupaten Badung			
	2013	2014	2015	2016
Angka Harapan Hidup	74.19	74.3	74.31	74.42
Harapan Lama Sekolah	12.88	13	13.45	13.66
Rata-rata Lama Sekolah	9.18	9.29	9.29	9.9
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	16025	16080	16080	16567
Indeks Pembangunan Manusia	77.63	77.98	78.86	79.8

IPM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2013-2016

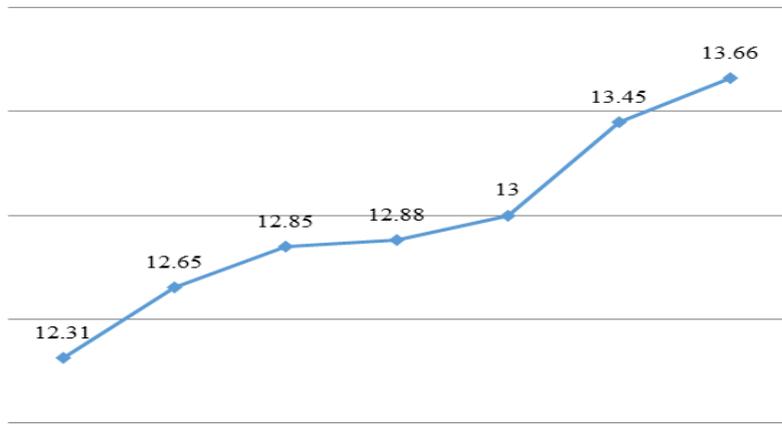


Angka IPM Kabupaten Badung tersebut diatas didukung oleh sub indikator sebagai berikut:

Angka Rata-rata lama sekolah menurut Kabupaten/ Kota di Prov Bali Tahun 2014-2016

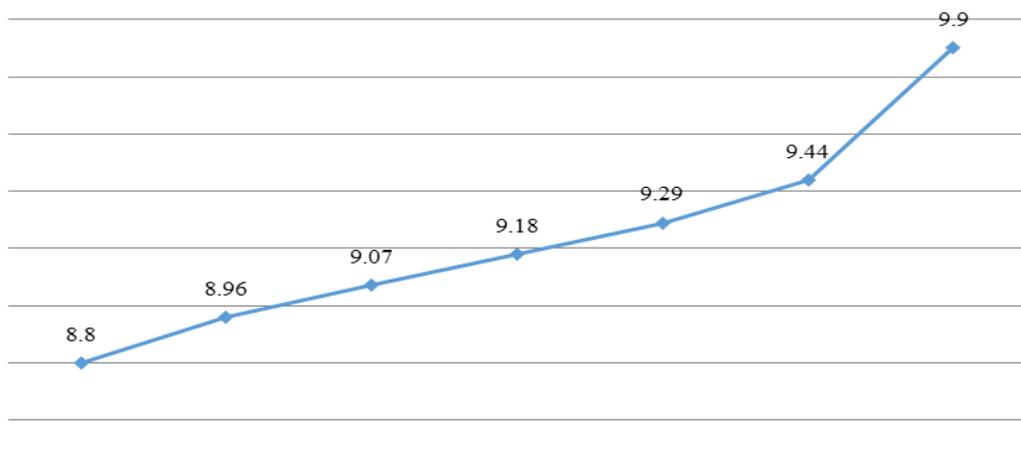


**PERKEMBANGAN CAPAIAN  
HARAPAN LAMA SEKOLAH  
TAHUN 2010 - 2016**



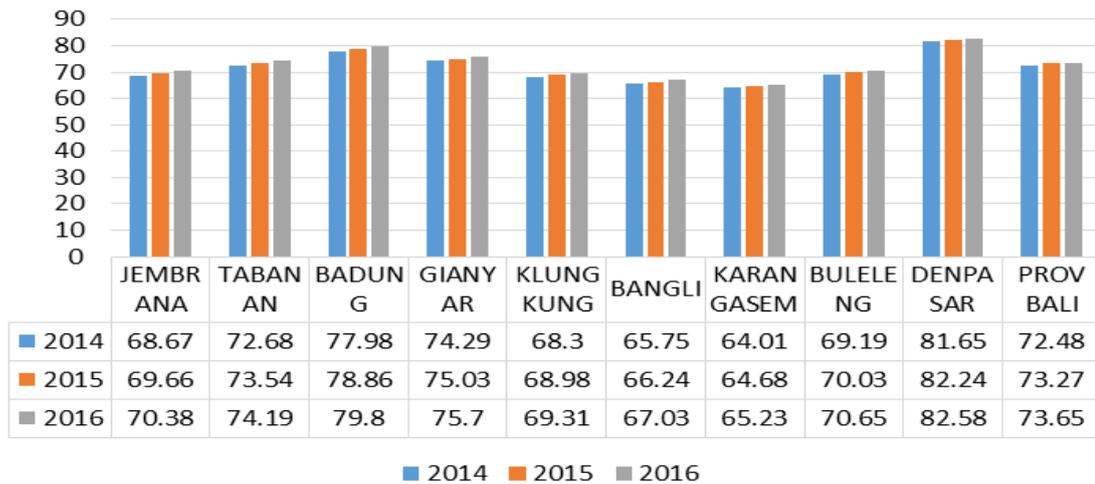
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
—●— HARAPAN LAMA SEKOLAH	12.31	12.65	12.85	12.88	13	13.45	13.66

**PERKEMBANGAN CAPAIAN  
RATA-RATA LAMA SEKOLAH  
TAHUN 2010 - 2016**

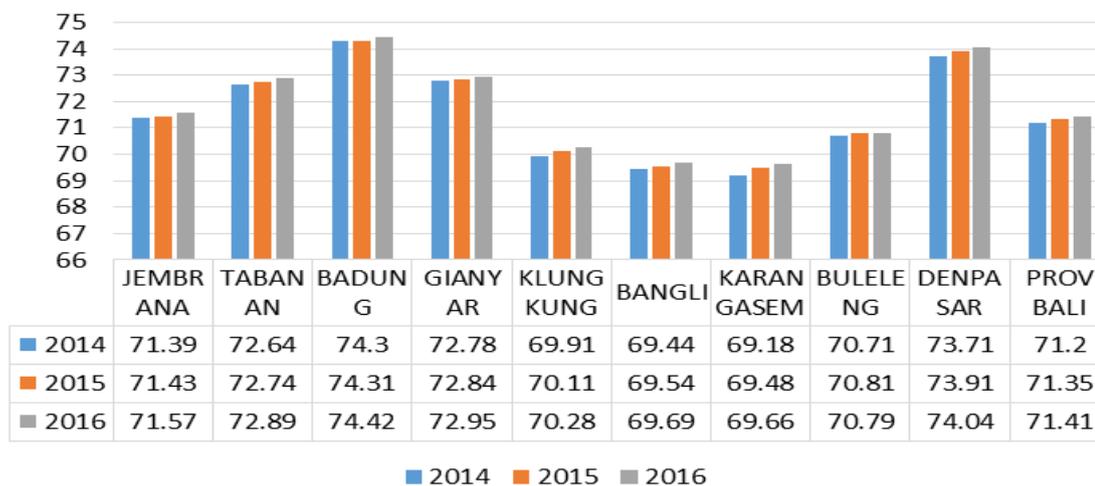


	1	2	3	4	5	6	7
—●— Series1	8.8	8.96	9.07	9.18	9.29	9.44	9.9

### CAPAIAN IPM MENURUT KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI BALI TAHUN 2014-2016



### ANGKA HARAPAN HIDUP MENURUT KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI BALI TAHUN 2014-2016



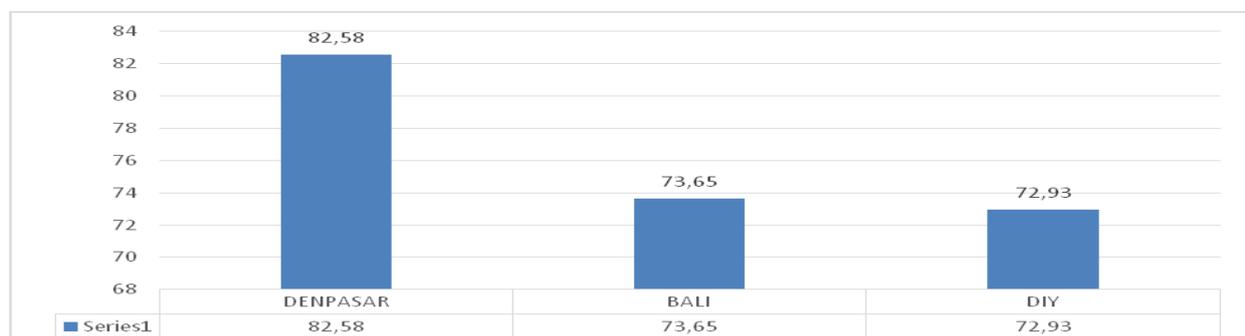
## SASARAN MENINGKATNYA TINGKAT KEBAHAGIAAN MASYARAKAT

Beberapa variabel utama, dalam menentukan Indeks Kebahagiaan adalah sebagai berikut : Kepuasan terhadap kondisi kesehatan, Kepuasan terhadap pendidikan dan keterampilan, Kepuasan terhadap pekerjaan, Kepuasan terhadap pendapatan rumah tangga, Kepuasan terhadap kondisi keamanan, Kepuasan terhadap hubungan social, Kepuasan terhadap ketersediaan waktu luang, Kepuasan terhadap kondisi rumah, Kebahagiaan hidup, Harapan/keinginan yang sudah tercapai, Kepuasan hidup, Kepuasan terhadap kondisi lingkungan, Kepuasan terhadap keharmonisan keluarga.



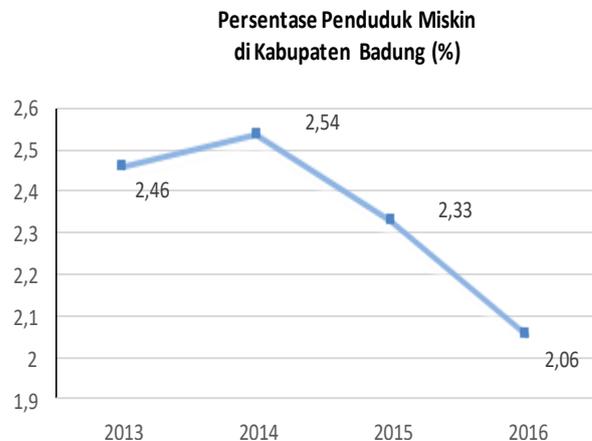
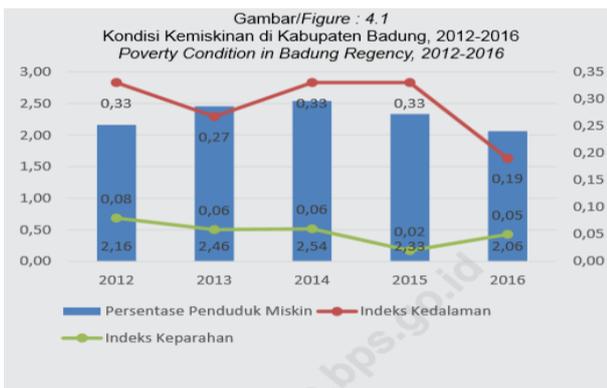
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta berkomitmen meningkatkan kesejahteraan sekaligus tingkat kebahagiaan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan masyarakat Badung tergolong tinggi, oleh karena itu Sasaran Meningkatnya Tingkat Kebahagiaan Masyarakat dengan indicator Indeks Kebahagiaan Masyarakat dalam RPJMD Semesta Berencana 2016-2021 diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera dan bahagia. Namun sasaran ini hasilnya baru akan diketahui tahun 2018. Sehingga Tahun 2017 dalam RPJMD belum ditetapkan target, namun tahun 2018 indeks kebahagiaan ditargetkan sebesar 71.5 Sebagai pembandingan Indeks kebahagiaan di Provinsi Bali tahun 2017 adalah sebesar 72.48 itu artinya secara umum masyarakat Bali tergolong Bahagia dan Kabupaten Badung turut memberikan kontribusi yang besar bagi terwujudnya Indeks Kebahagiaan Provinsi Bali Tahun 2017. Indeks kebahagiaan Provinsi Bali dan Kota Denpasar dapat dilihat dalam diagram berikut:



### Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan

Upaya strategis dalam menangani masalah kemiskinan di Kabupaten Badung melalui lima program unggulan yang dicanangkan dalam Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB), di antaranya program bedah rumah dimana setiap rumah tangga dianggarkan Rp.55 juta yang secara teknis cukup untuk membangun rumah sederhana, layak huni dan berkualitas. Faktor kemiskinan bukan saja akibat masalah fisik atau rumah semata-mata, namun dipengaruhi faktor kemudahan akses dan mentalitas. Pemkab Badung melibatkan semua pihak serta program-program strategis yang dituangkan pada APBD Badung dalam penanganan kemiskinan serta dapat memberikan nilai yang strategis dan bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas penetapan sasaran untuk program perlindungan sosial. Penanganan kemiskinan ini telah tercantum dalam program *Asta Marga Utama Desa* yang utamanya untuk percepatan pengentasan kemiskinan. Tahun 2017 angka kemiskinan di targetkan 2,30% - 2.25%, melalui berbagai program yang dilaksanakan seperti perbaikan kualitas rumah sehat, usaha ekonomi produktif serta upaya untuk mencegah bertambahnya angka kemiskinan melalui program pemberian santunan penunggu pasien. Upaya ini berdampak angka kemiskinan Tahun 2017 menjadi 2,06% .



### Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM Terhadap PDRB

Sasaran Meningkatnya Kontribusi sektor UMKM Terhadap PDRB dengan indikator Persentase Kontribusi Sektor UMKM Terhadap PDRB merupakan sasaran baru dalam RPJMD Semesta Berencana 2016-2021. Tahun 2017 sasaran ini ditargetkan sebesar 7,73% sedangkan capaian kerjanya ditetapkan sementara 7,73%\* karena Badan Statistik Kabupaten Badung yang secara normatif baru akan dikeluarkan sekitar bulan Maret – April Tahun 2018 sehingga capaian realisasi diasumsikan sama dengan target yang ditetapkan tahun 2017.

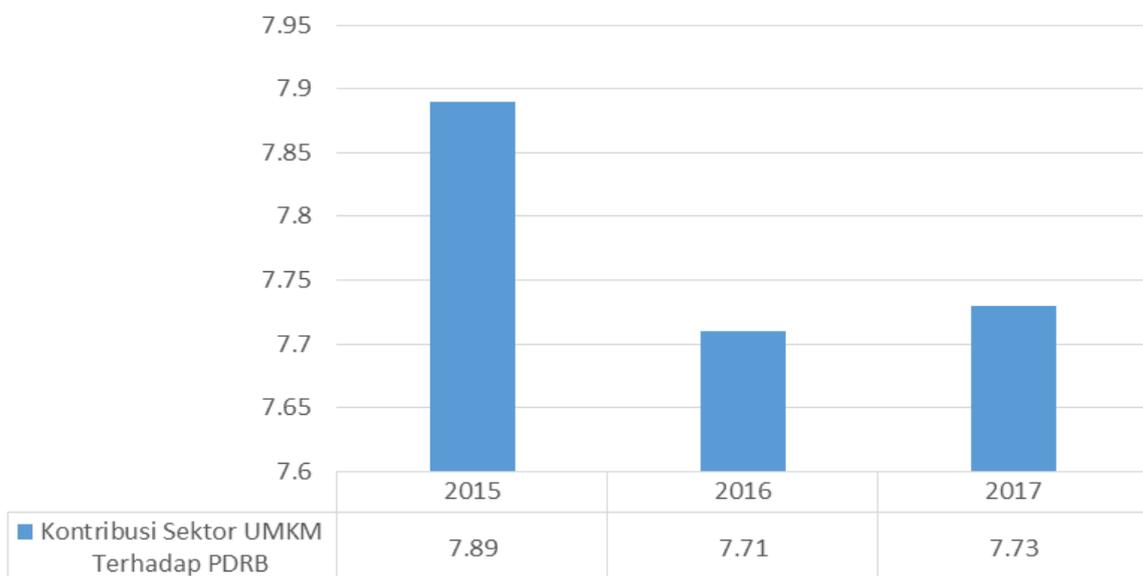
Penetapan realisasi Tahun 2017 didasari atas pertimbangan kondisi ekonomi dan pengaruh bencana erupsi Gunung Agung yang pasti mempengaruhi sektor jasa atau pariwisata dan struktur ekonomi Badung yang menjadi penggerak perekonomian semua komponen penyumbang terhadap PDRB. Bila dibandingkan dengan realisasi kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB berdasarkan atas lapangan usaha yaitu perdagangan besar dan eceran dan industri pengolahan adalah sebesar 7,89% tahun 2015 ( BPS, Tahun 2011-2015) dan 7,71% tahun 2016 (BPS, Tahun 2012-2016) sehingga mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0.02%.



Sektor UMKM memberikan sumbangan yang positif bagi PDRB di Kabupaten Badung

Terjadinya peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDRB didukung oleh berkembangnya industri pengolahan yang berasal dari kayu dan rotan yang sangat diminati oleh wisatawan dan kebutuhan lokal serta lapangan usaha perdagangan mengalami fluktuasi dari tahun sebelumnya namun masih memberikan sumbangan terhadap kontribusi PDRB Badung. Dibandingkan dengan target pada akhir 2021 sebesar 7,91% dengan peningkatan sebesar 0,02 % pertahun akan tercapai apabila kondisi perekonomian dan sektor jasa yang merupakan andalan penggerak perekonomian Badung tidak mengalami permasalahan baik sosial maupun keamanan yang menjadi faktor keberlangsungan sektor jasa yang ada di Kabupaten Badung.

### Kontribusi Sektor UMKM Terhadap PDRB



### Sasaran Meningkatnya Pencegahan Pelanggaran Perda dan Perkada

Untuk menjaga agar wisatawan yang datang ke Kabupaten Badung tetap merasa aman dan nyaman diperlukan upaya yang konsisten untuk dapat mengantisipasi terjadinya berbagai pelanggaran terhadap Perda dan Perkada khususnya yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kebersihan lingkungan. Sasaran meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada dengan Indikator Persentase Pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada tahun 2017 di targetkan 80% persen realisasinya 91.92% dengan capaian kinerja sebesar 114.9% dimana di akhir periode RPJMD indikator Persentase Pencegahan Pelanggaran Perda dan Perkada ditargetkan menjadi 100%. Untuk mewujudkan sasaran ini dilakukan melalui kegiatan patroli keamanan dan ketertiban umum



Upaya Pembinaan sebagai salah satu langkah untuk mencegah terjadinya pelanggaran PERDA

### Sasaran Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada

Sebagai daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi paling tinggi di Bali, Kabupaten Badung disamping menjadi incaran para investor yang ingin menanamkan modalnya juga menarik minat penduduk pendatang dari berbagai daerah untuk ikut mengais rejeki dan menetap di Kabupaten Badung. Dengan kondisi seperti itu, maka upaya untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui upaya penegakan Perda dan Perkada mengalami tantangan yang berat. Sasaran meningkatnya penegakan Perda dan Perkada dengan indikator Persentase penegakan Perda dan Perkada diharapkan dapat menciptakan keserasian dan kenyamanan bagi masyarakat dan wisatawan. Tahun 2017 persentase penegakan Perda dan Perkada ditargetkan 75% persen dengan realisasi 81% dengan capaian kinerja sebesar 108% dan diakhir periode RPJMD KABUPATEN Badung Tahun 2016-2021

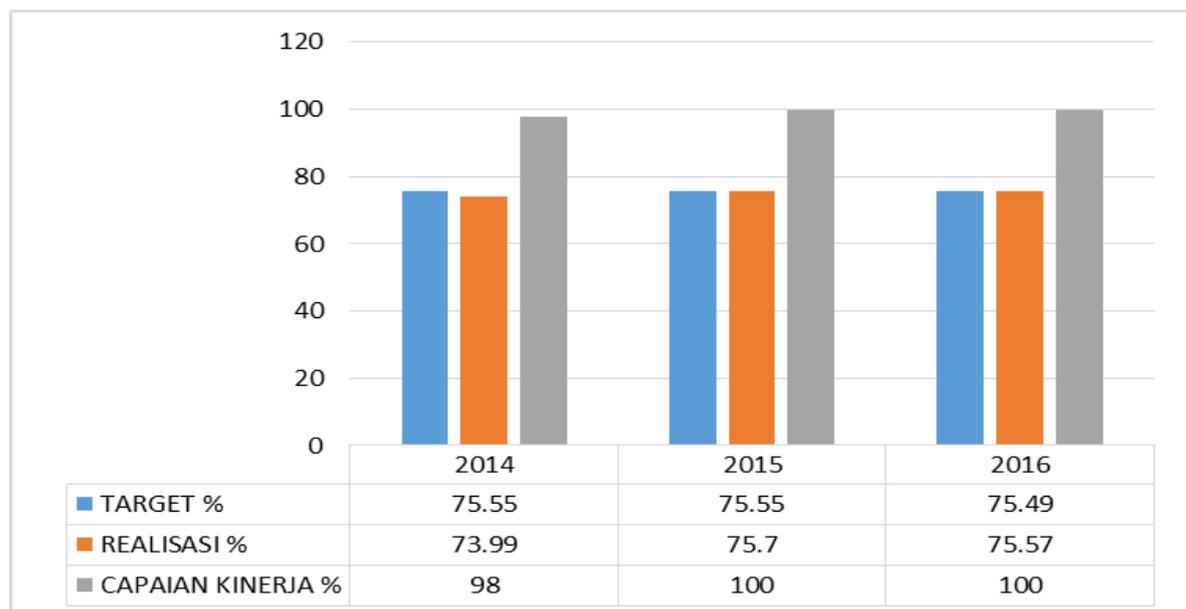
ditargetkan menjadi 95%. Penegakan Perda dilakukan melalui program pemeliharaan ketertiban umum dan pencegahan tindak kriminal.



Satpol PP memegang peranan penting dalam rangka penegakan PERDA / PERKADA

### Sasaran Meningkatnya Pengarustamaan Gender

Sasaran ini merupakan sasaran baru dengan indikator indeks pembangunan gender atau IPG bertujuan untuk mengukur peranan wanita dalam mendapatkan akses di bidang pendidikan, kesehatan dan kesempatan berusaha. Tahun 2017, IPG kabupaten badung ditargetkan 75.61 sedangkan capaian kinerjanya baru akan bisa diperoleh pada akhir tahun 2017 mengingat untuk mendapatkan IPG dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang saat ini masih dalam proses survey. Sebagai perbandingan perkembangan IPG di Kabupaten Badung sesuai dengan tabel berikut:



Berdasarkan table diatas IPG Kabupaten Badung tahun 2015 dan 2016 terus mengalami peningkatan. Tahun 2015 IPG 75,7 sedangkan tahun 2016 75,57 sesuai hasil survey, masih terdapat kesenjangan gender di Kabupaten Badung karena angka IPG lebih Kecil dibandingkan dengan dengan angka IPM dimana IPG Kabupaten Badung Tahun 2016 adalah 75,57 sedangkan IPM Tahun 2016 79,80.



Keberhasilan Pembangunan di Kabupaten Badung tidak dapat dilepaskan dari peran aktif kaum wanita

### Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Dari 60 titik sampling, 27 titik sampling kategori baik (memenuhi baku mutu), 33 titik sampling kategori cemar ringan, 0 titik cemar sedang, dan 0 titik cemar berat, catatan untuk di Bali pada umumnya dan Badung pada khususnya belum ada penetapan kelas sungai, maka penetapan kualitas air menggunakan baku mutu lingkungan air kelas II. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengembangkan suatu indeks lingkungan berbasis provinsi sejak tahun 2009 dan telah diperbaharui pada tahun 2012 yang dapat memberi jawaban terhadap kondisi lingkungan suatu wilayah dalam periode tertentu. Indeks kualitas lingkungan hidup ( IKLH ) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup periode tertentu.



Pantai Kuta harus tetap dijaga kelestariannya

Bagi Kabupaten Badung penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup terkait erat dengan kebutuhan prioritas pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam salah satu dari enam prinsip dasar pembangunan Kabupaten Badung yaitu PRO ENVIRONMENT dan selaras dengan sasaran RPJMN (untuk tahun 2019 sasaran IKLH berkisar : 66,5-68,5), Tahun 2017 IKLH ditargetkan sebesar 65,90 sedangkan berdasarkan hasil survey capaian kinerja indikator ini mencapai 73,08 ( 110.89%)



Indeks kualitas Lingkungan Hidup diharapkan dapat menjaga kualitas air sungai di Kabupaten Badung

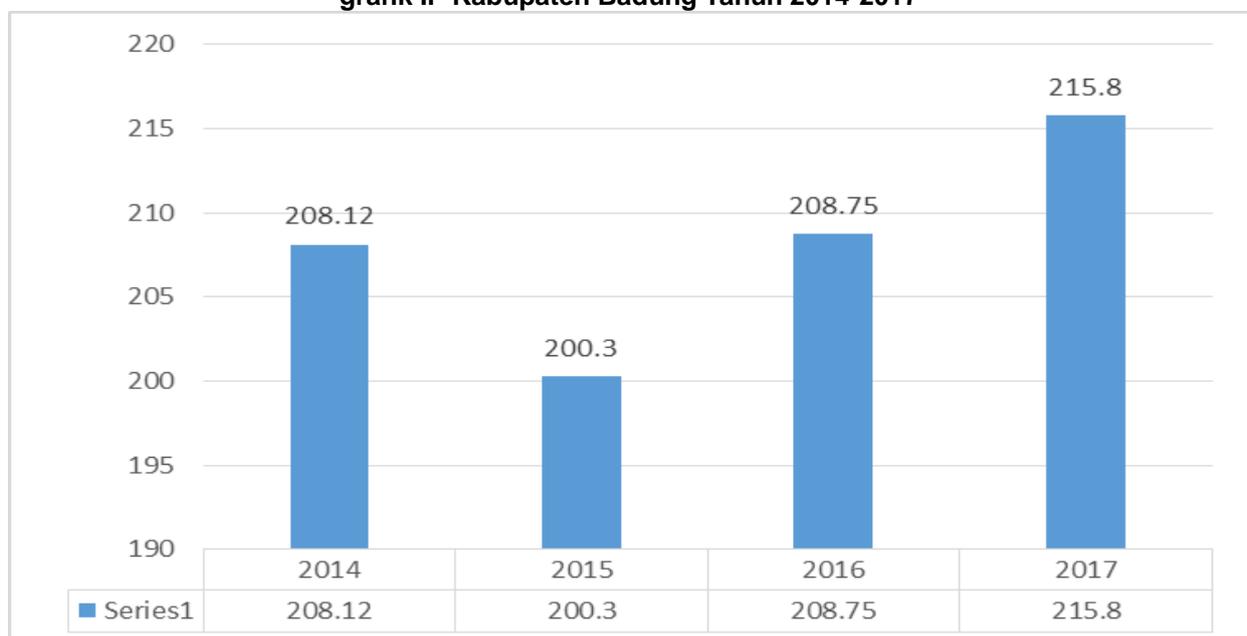
### Indeks Pertanaman (IP)

Dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan pangan serta mempertahankan kualitas lingkungan hidup melalui penghijauan lahan maka dalam RPJMD SB 2016-2021 ditetapkan indikator baru yaitu Indeks Pertanaman. Indeks Pertanaman (IP) menunjukkan kerapatan pertanaman pada sebidang lahan. IP ini menunjukkan berapa kali melakukan penanaman padi, palawija dan hortikultura dalam setahunnya. Tahun 2017 IP ditargetkan sebesar 185 dengan realisasi 215,80 Hal ini berarti Di Kabupaten Badung terjadi peningkatan IP dibandingkan tahun 2016 sebesar 208,75. Semakin tinggi IP semakin rapat pertanaman pada sebidang lahan semakin banyak proses fotosintesa yang terjadi dan menghasilkan Oksigen (O<sub>2</sub>) untuk lingkungan hidup yang sehat. Faktor-faktor yang mempengaruhi IP adalah: Irigasi, Alsintan, Teknologi, Hama dan Penyakit, Benih dan Tenaga Kerja. Untuk mendukung indeks Pertanaman dilaksanakan melalui penerapan pola tanam yang optimal.



Seiring dengan keterbatasan lahan pertanian, pemanfaatan lahan melalui indeks pertanaman diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan dan pelestarian Lingkungan

grafik IP Kabupaten Badung Tahun 2014-2017



### Sasaran Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana

Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, merujuk pada peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana yaitu dengan dukungan komitmen serta kebijakan yang menyeluruh dalam pengurangan resiko bencana di suatu daerah telah memperoleh capaian – capaian yang berhasil, namun **diakui ada masih keterbatasan dalam komitmen, sumber daya finansial ataupun kapasitas operasional** dalam pelaksanaan upaya pengurangan resiko bencana di daerah tersebut.



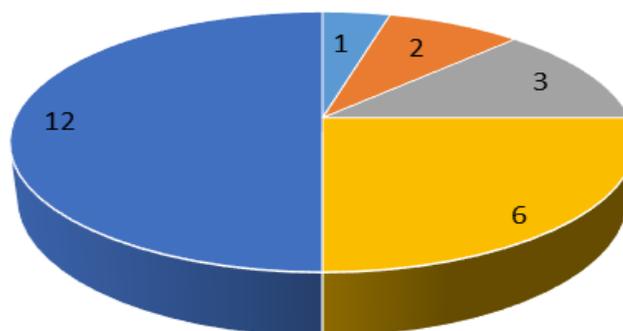
Sebagai daerah tujuan pariwisata, Kabupaten Badung dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menanggulangi segala macam bencana .

Upaya pengurangan resiko bencana di Kabupaten Badung telah terkoordinasi dengan terbentuknya BPBD Kabupaten Badung Tahun 2011. Bencana yang telah terjadi dalam kurun waktu 2011 – 2017 yang terdata di BPBD Badung telah dilaksanakan penanganan secara terkoordinasi dengan dukungan pendanaan yang cukup memadai. Ada tiga pilar pelaksana penanggulangan bencana yaitu Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Ketiga pilar ini harus memiliki komitmen yang besar dalam upaya pengurangan resiko bencana. Dunia Usaha saat ini juga sudah cukup besar komitmennya namun tetap perlu ditingkatkan melalui koordinasi sehingga mencapai hasil sesuai harapan. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk operasional penanggulangan bencana yang telah ada sampai saat ini cukup memadai sehingga penanganan dampak bencana yang terjadi di Kabupaten Badung telah dapat terlaksana dengan baik, Namun mengingat adanya kecenderungan semakin

meningkatnya jumlah bencana, maka tetap dibutuhkan sarana – sarana pendukung operasional yang baru dan makin canggih.

Tahun 2017 Kabupaten Badung menargetkan **kapasitas** daerah dalam penanggulangan bencana pada level 4, berdasarkan penjelasan, fakta dan data diatas, maka capaian kinerja indicator ini telah mencapai target yaitu telah memenuhi semua persyaratan untuk berada pada level 4

### SEKOLAH AMAN BENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2013 - 2017



■ 2013 ■ 2014 ■ 2015 ■ 2016 ■ 2017

### DESA TANGGUH BENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2014-2017



	2014	2015	2016	2017
DESA TANGGUH BENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2014-2017	4	6	11	21

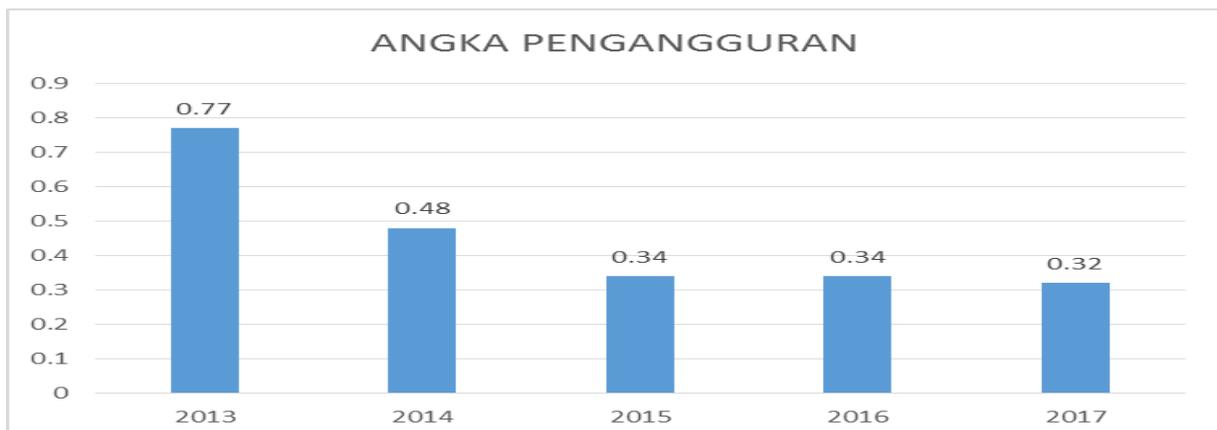
### SASARAN MENINGKATNYA DAYA SAING TENAGA KERJA

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Badung untuk Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2017 adalah 0,48% sedangkan targetnya adalah 0,335% , terjadi kenaikan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,145% sehingga capaian kinerja 69,79%, Hal ini kemungkinan disebabkan karena terjadi bencana alam Erupsi Gunung Agung menyebabkan menurunnya atau melambatnya pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor akibat ditutupnya Bandara Ngurah Rai terhadap sehingga jumlah wisatawan berkunjung mengalami penurunan drastis , accupacy hotel menurun, karyawan ada yang dirumahkan dan gajinya dibayar 50%. Hal ini berimbas terhadap karyawan /delay worker secara otomatis mereka tidak punya pekerjaan,



Dibutuhkan tenaga kerja sektor kepariwisataan yang semakin berkualitas

Sebagai perbandingan, berdasarkan hasil pendataan jumlah pengangguran tahun 2017 bekerjasama dengan Universitas Warmadewa, tingkat pengangguran terbuka adalah 0,32% sedangkan Target pada tahun 2017 adalah 0,35% dengan Realisasi kinerja 104,69%. Berdasarkan hasil pendataan ini, Jumlah pengangguran adalah 1123 orang apabila dibandingkan dengan data jumlah penduduk Kabupaten Badung semester I Tahun 2017 adalah 486.646 orang , dengan asumsi 75% dari jumlah penduduk ini adalah angkatan kerja berjumlah 351.260 orang maka tingkat pengangguran terbuka adalah  $1123 : 351.246 \times 100 \% = 0,32\%$ .

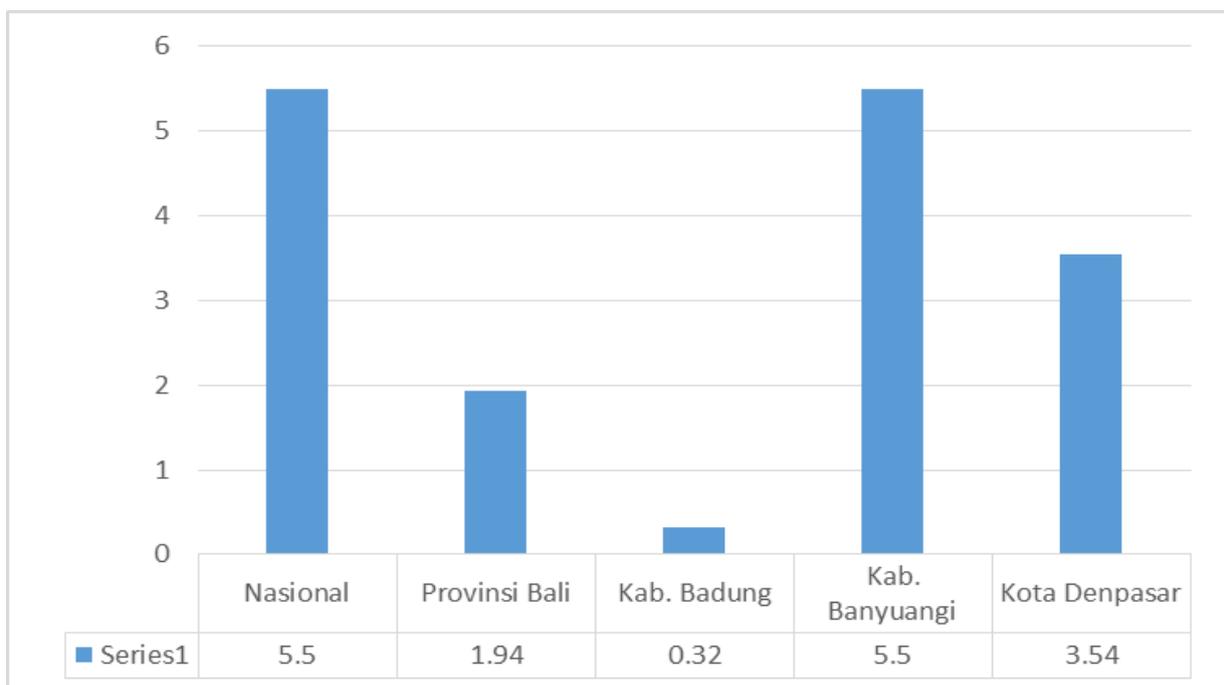


Grafik : Angka Pengangguran Sumber : BPS Kabupaten Badung



Erupsi Gunung Agung tahun 2017 mengakibatkan Bandara I Gusti Ngurah Rai ditutup yang berdampak pada menurunnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung

Bila dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Provinsi dan Kabupaten / Kota di Indonesia seperti tabel dibawah :



Sumber : BPS dimasing - masing Provinsi & Kabupaten/Kota

**SASARAN MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG BERKUALITAS**

Infrastruktur wilayah yang mantap dan berkualitas diharapkan dapat menjamin kelancaran distribusi barang dan jasa, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing daerah di tingkat nasional dan internasional. Sebagai daerah tujuan wisata yang sudah terkenal Kabupaten Badung dituntut mampu menyediakan infrastruktur wilayah yang berkualitas sehingga mampu bersaing dengan para kompetitor dari negara lain yang sama-sama mengandalkan sektor kepariwisataan.



Salah satu infrastruktur jalan dan trotoar di Kabupaten Badung diharapkan semakin meningkat kualitasnya

Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan dan dibutuhkan agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Infrastruktur yang dimaksud dalam laporan ini adalah dibatasi pada jalan, jembatan dan sarana irigasi. Target yang ditetapkan untuk tahun 2017 terhadap infrastruktur berkondisi mantap sebesar 97.50% merupakan rata rata dari kondisi baik infrastruktur jalan dan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Badung dengan realisasi sebesar 94.30% dengan capaian kinerja sebesar 96.72%, tidak tercapainya kinerja ini disebabkan karena adanya penambahan ruas jalan baru di Kabupaten Badung.

**CAPAIAN KINERJA**

INDIKATOR	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN KINERJA
INFRASTRUKTUR DALAM KONDISI MANTAP	97,50	94.30	96.72%

## SASARAN MENINGKATNYA PRODUKSI PANGAN NABATI DAN HEWANI

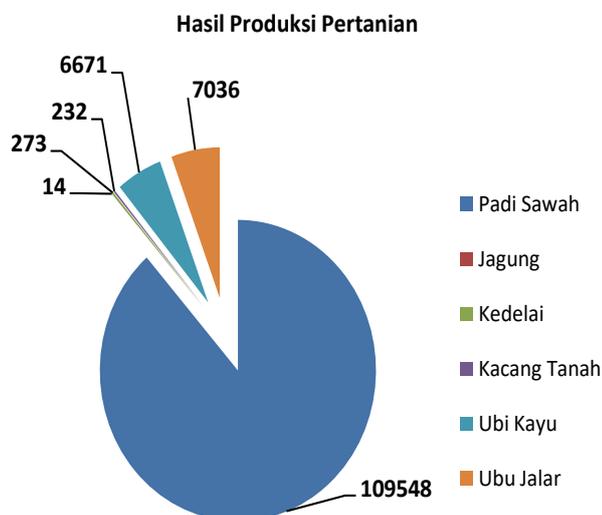
### Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan menggambarkan keragaman dan mutu pangan yang dikonsumsi oleh penduduk Kabupaten Badung, dengan menggunakan skor, yaitu jumlah skor dari kontribusi energi dikalikan bobot menurut bahan makanan.



Panen Jagung di Badung Utara

Kontribusi energy terbesar berasal dari kelompok bahan makanan Padi-padian sebesar 50% dan kontribusi terbesar kedua adalah energy dari kelompok bahan makanan Pangan Hewani sebesar 12%, serta kontribusi terkecil adalah bahan makanan buah dan biji berminyak sebesar 3%. Sedangkan skor tertinggi adalah dari kelompok sayur-sayuran sebesar 30, yang kedua kelompok bahan makanan padi-padian 25 dan berikutnya kelompok bahan makanan pangan hewani (termasuk ikan) sebesar 24.



Realisasi target Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan rata-rata rumah tangga penduduk Kabupaten Badung tahun 2017 adalah 94,50 dari target 93.50 masih lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 93. Sedangkan Target Skor Pola Pangan Harapan Nasional adalah 100.

### **Sasaran Meningkatnya Daya Tarik Wisata yang Berdayasaing**

Untuk menjaga agar sektor pariwisata dapat terus menjadi primadona dan motor penggerak roda pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung serta dapat terus bersaing dengan destinasi wisata kelas dunia lainnya, maka pengembangan daya tarik wisata harus mendapatkan prioritas utama dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, sasaran meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing dengan indikator prosentase daya tarik wisata yang berdaya saing merupakan bentuk komitmen menjaga keberlangsungan sektor kepariwisataan. Tahun 2017 daya tarik wisata yang berdayasaing ditargetkan 64% terealisasi sebesar 64% ( 23 DTW ) dari 36 DTW yang ada di Kabupaten Badung, sehingga capaian kinerja sebesar 100 %.



Pantai uluwatu dikunjungi ribuan wisatawan setiap tahunnya

Apabila dibandingkan dengan tahun 2016 target 61% ( 22 DTW ) dengan realisasi 61% (22 DTW ) dengan capaian kinerja 100% sedangkan pada tahun 2017 target 64% ( 23 DTW ) dengan realisasi sebesar 64% ( 23 DTW ) dengan capaian kinerja 100%, terjadi peningkatan sebesar 1 DTW yang memenuhi standar pada tahun 2017.

Program pendukung persentase daya tarik wisata yang memenuhi standar adalah program pengembangan destinasi pariwisata dengan 11 kegiatan , dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.828.355.200, termasuk dana DAK sebesar Rp. 1.410.000.000 untuk pembangunan dan penataan DTW Pantai Pandawa.

Dengan adanya daya tarik wisata yang memenuhi standar dapat meningkatkan daya tarik wisata yang berdaya saing, sehingga Kabupaten Badung tetap menjadi daerah tujuan wisata yang utama di provinsi Bali dengan didukung oleh program pemasaran pariwisata dengan kegiatan promosi pariwisata baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Apabila dibandingkan dengan kota lainnya di Indonesia Kabupaten Badung menduduki peringkat ke 2 setelah Sukabumi dalam aspek potensi ( jumlah ) wisata alam dan wisata buatan. ( sumber: Litbang Kompas yang mengacu pada konsep Travel and Tourism Competitive Index )



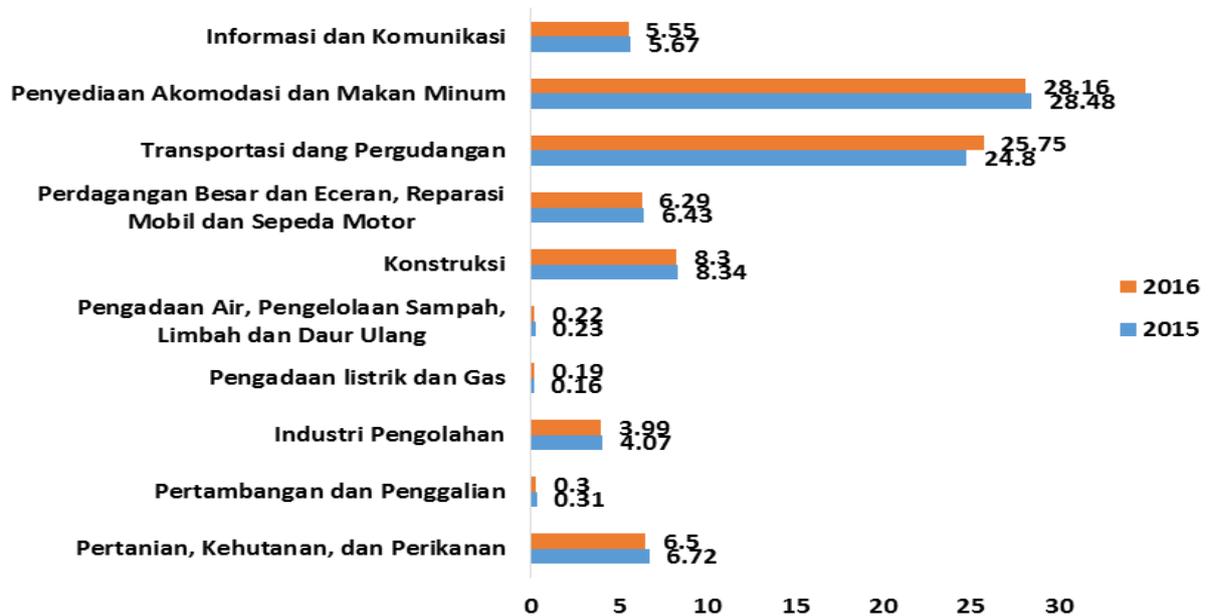
### SASARAN MENINGKATNYA KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB

Sektor pariwisata telah terbukti mampu menjadi lokomotif pembangunan di Kabupaten Badung serta memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan asli daerah ( PAD ) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB terutama didukung bidang usaha penyediaan akomodasi dan makan minum , transportasi dan pergudangan terus menunjukkan perkembangan yang positif.



Bidang usaha Hotel dan Restoran memberikan sumbangan besar bagi PDRB Kabupaten Badung

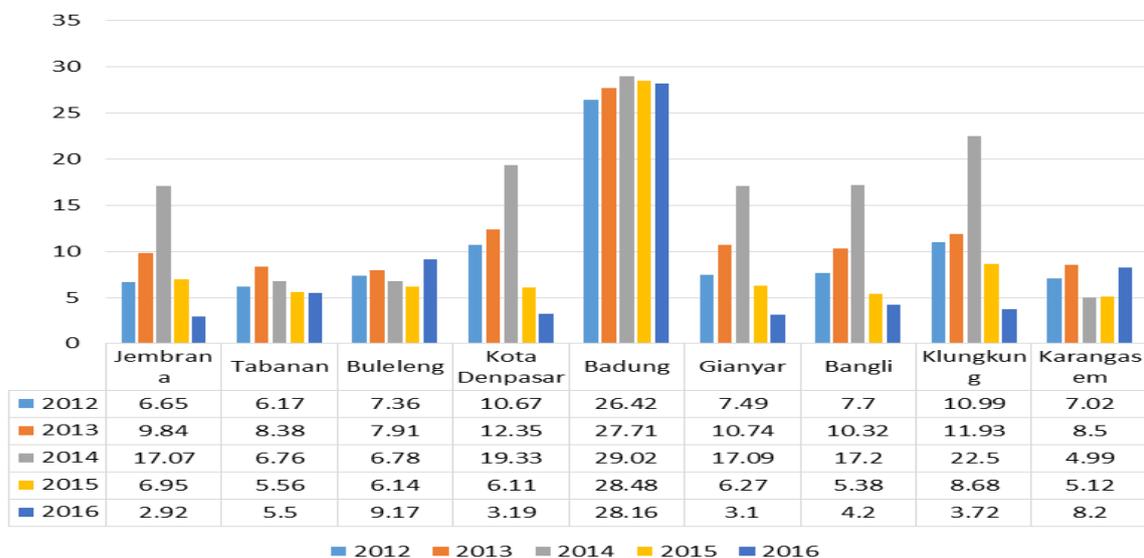
Tahun 2017 kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Badung ditargetkan 28.17, sehingga capaian kinerja sebesar 100% . Untuk kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Badung dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini



Sumber: Statistik Kabupaten Badung

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Sektor Pariwisata setiap tahun memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Badung dibandingkan dengan sektor lainnya di Kabupaten Badung, dimana pada tahun 2016 sektor pariwisata memberikan kontribusi terbesar yaitu 28,16% dibandingkan dengan sektor lainnya.

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Bali Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Sumber : Badan Statistik Provinsi Bali

Dari tabel di atas dapat dilihat Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB seluruh Kabupaten di Bali, sektor pariwisata di Kabupaten Badung memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Badung yaitu sebesar 28,16% dibandingkan dengan 8 Kabupaten /Kota yang ada di Bali

### 3.3. Akuntabilitas Keuangan.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah didasari atas komitmen bahwa anggaran yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung. Oleh karena itu kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam konteks memantapkan otonomi daerah desentralisasi fiskal yang menganut prinsip “ Money Follows Program “ yaitu pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan alokasi dan fungsinya dengan dukungan pendanaan melalui penyerahan sumber-sumber pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah dan alokasi dana dari Pemerintah pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah daerah lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut diatas ada tiga kebijakan yang diimplementasikan yaitu : (1) pengelolaan pendapatan daerah, (2) pengelolaan belanja dan (3) pengelolaan pembiayaan daerah.

Realisasi anggaran dan kinerja Pemerintah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

Pagu anggaran tahun 2017 adalah sebesar : Rp. 6.172.197.577.820,73  
Realisasi : Rp. 5.412.294.132.028,13 (87.69% )

terdiri dari :

1. Belanja Langsung:

pagu : Rp. 3.177.103.763.319,34  
Realisasi : Rp. 2.670.139.218.573,59 (84.04%)

terdiri dari :

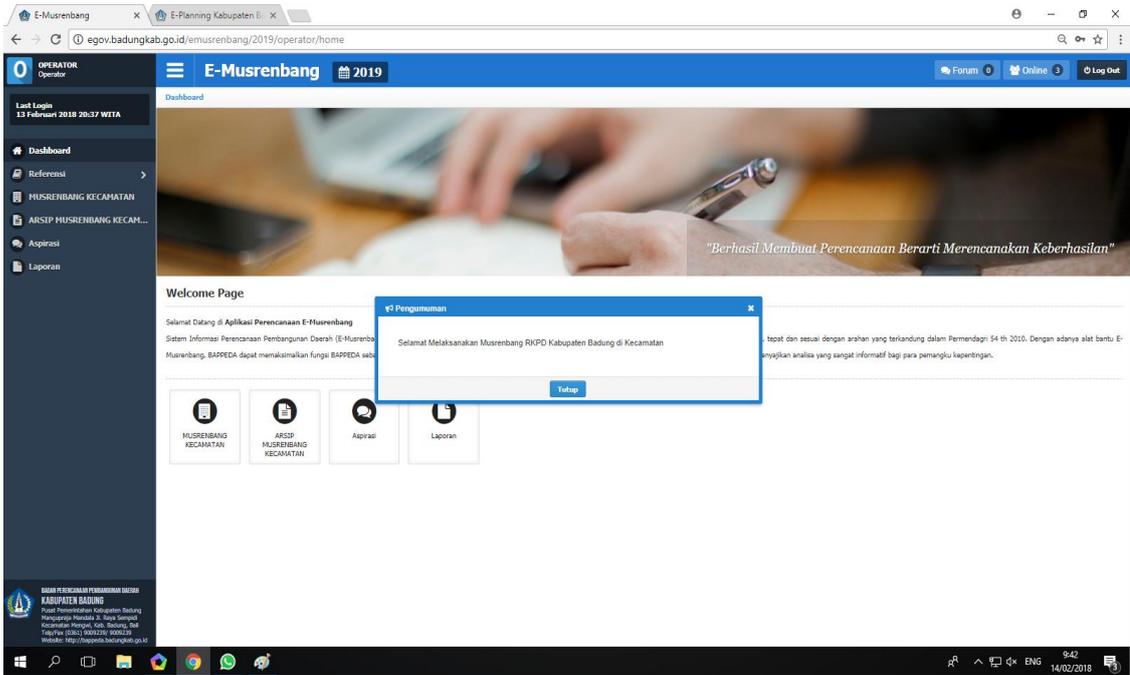
- Belanja pegawai Rp.89.355.043.637,00 realisasi Rp.75.057.726.519,00 (84%)
- Belanja barang/jasa Rp. 1.609.047.947.982,54 realisasi Rp. 1.355.516.318.132,21 (84.24%)
- Belanja modal Rp. 1.478.700.771.699,80 realisasi Rp.1.239.565.173.922,38 (83,83%)

2. Belanja tidak langsung :

pagu : Rp. 2.995.093.814.501,39  
Realisasi : Rp. 2.742.154.913.454,54 (91.55%)

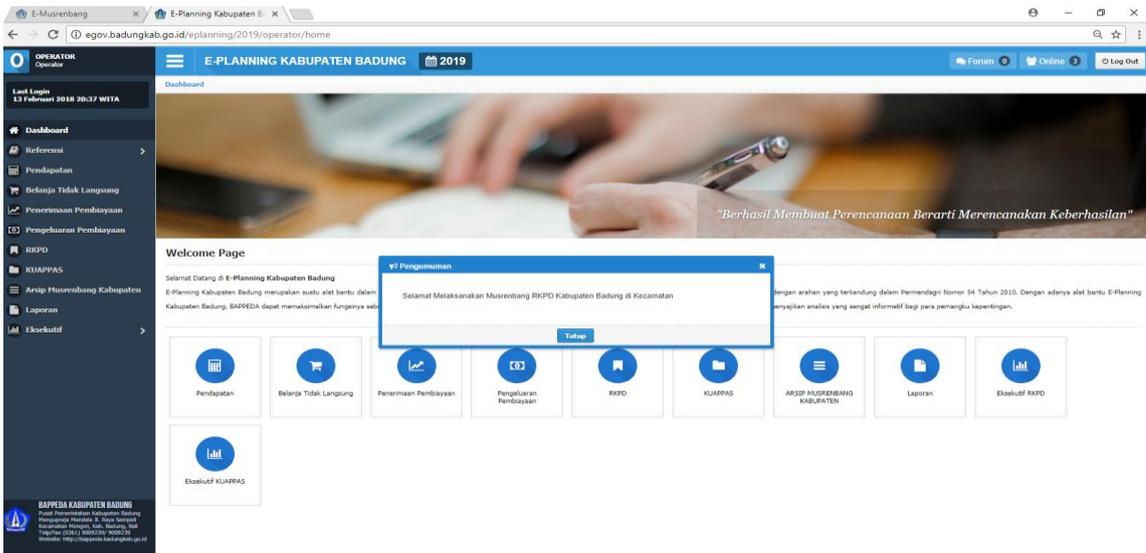
### 3.3 INOVASI DAERAH

#### 1. E-Musrenbang



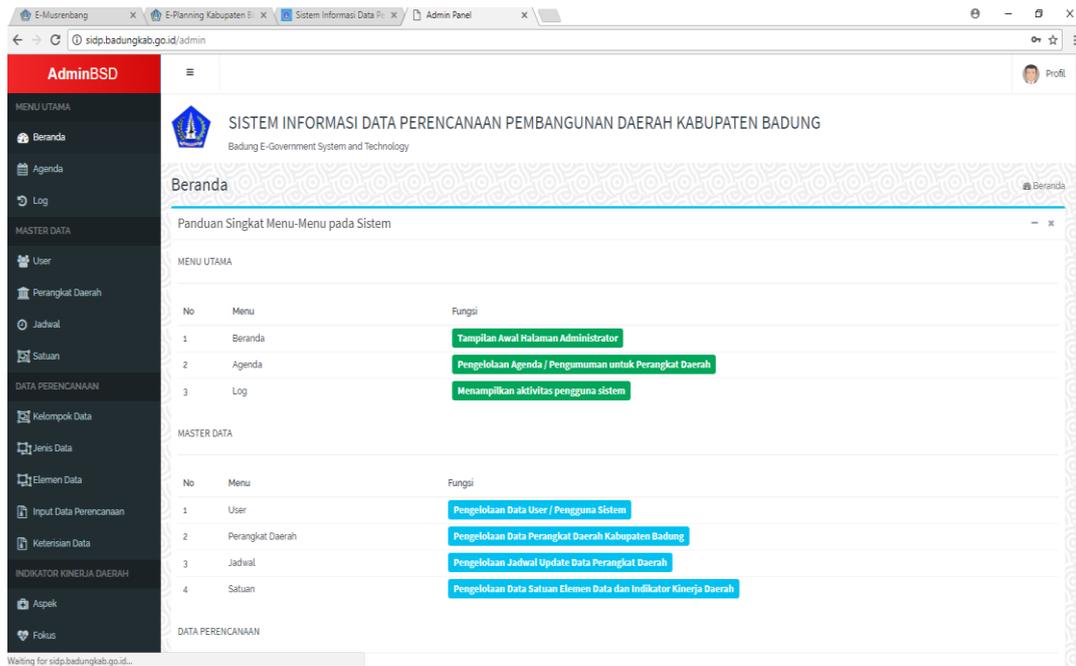
E-Musrenbang adalah sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan dalam pengolahan data-data usulan yang diajukan oleh desa/kelurahan pada saat acara musrenbang kecamatan. Dengan aplikasi ini, membantu memudahkan dalam menyerap kebutuhan masyarakat serta menghindari munculnya proyek siluman.

#### 2. E-Planning



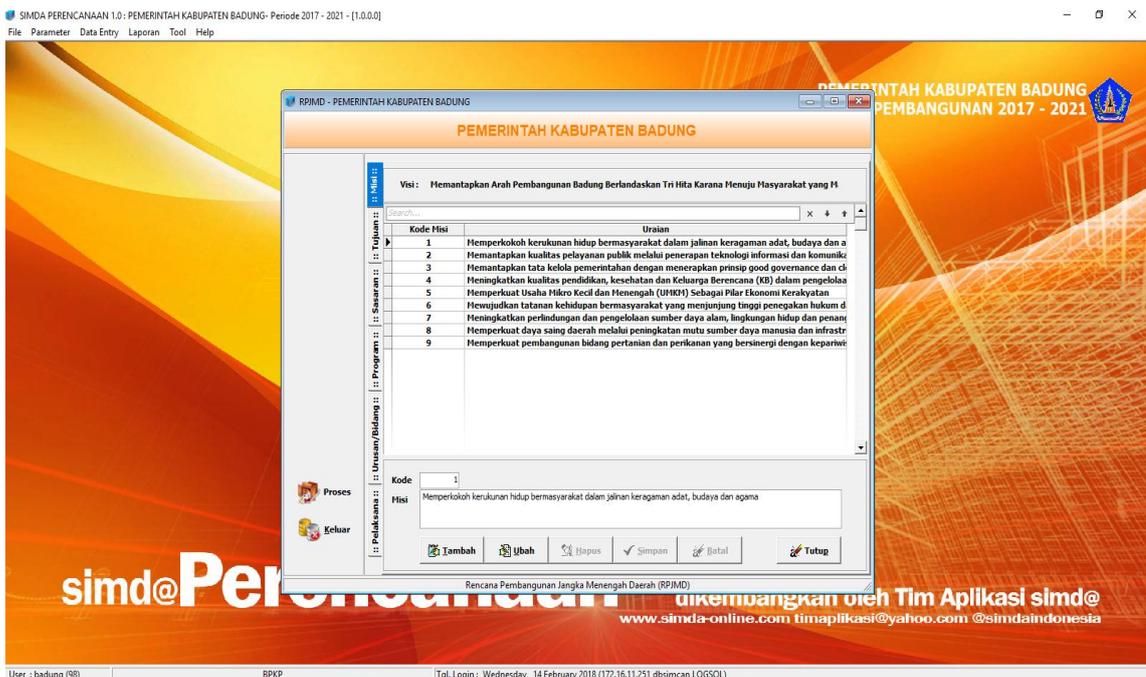
E-Planning adalah sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk pengolahan data-data yang berasal dari e-musrenbang untuk kemudian direkap kembali menjadi bentuk RKPD. Dengan e-planning membantu mengarahkan program/kegiatan agar selaras dengan sasaran strategis RPJMD.

### 3. Sistem Informasi Data Perencanaan (SIDP)



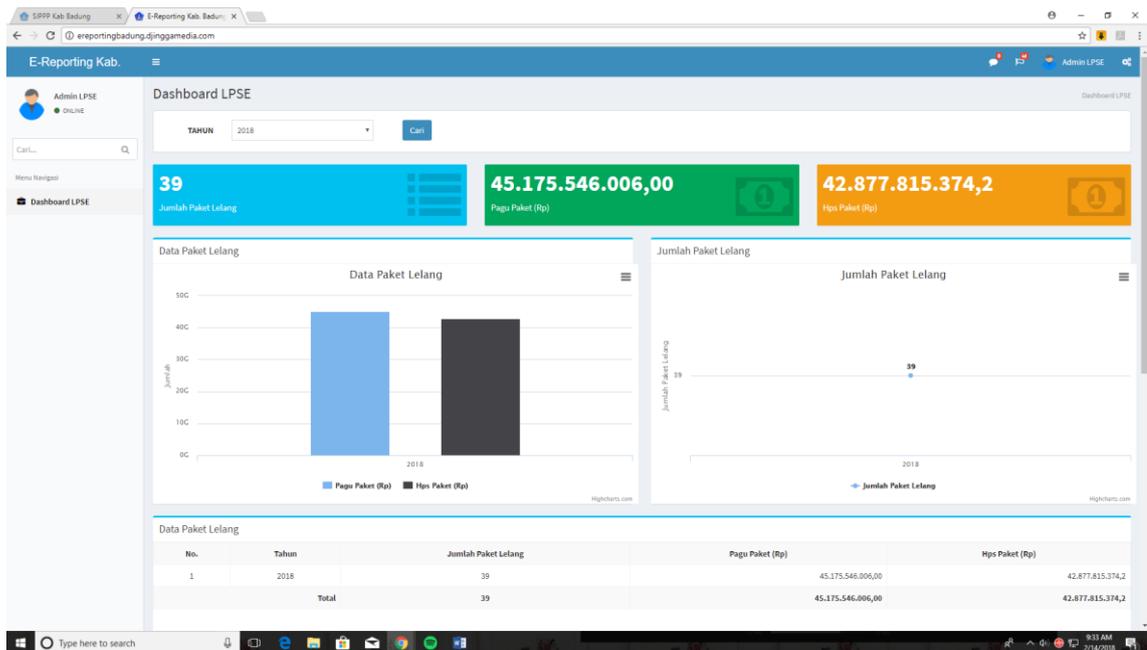
Sistem Informasi Data Perencanaan (SIDP) merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang berbentuk statistik yang digunakan untuk membackup keperluan data-data yang dibutuhkan untuk menunjang kinerja perencanaan, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan.

### 4. Simda Perencanaan



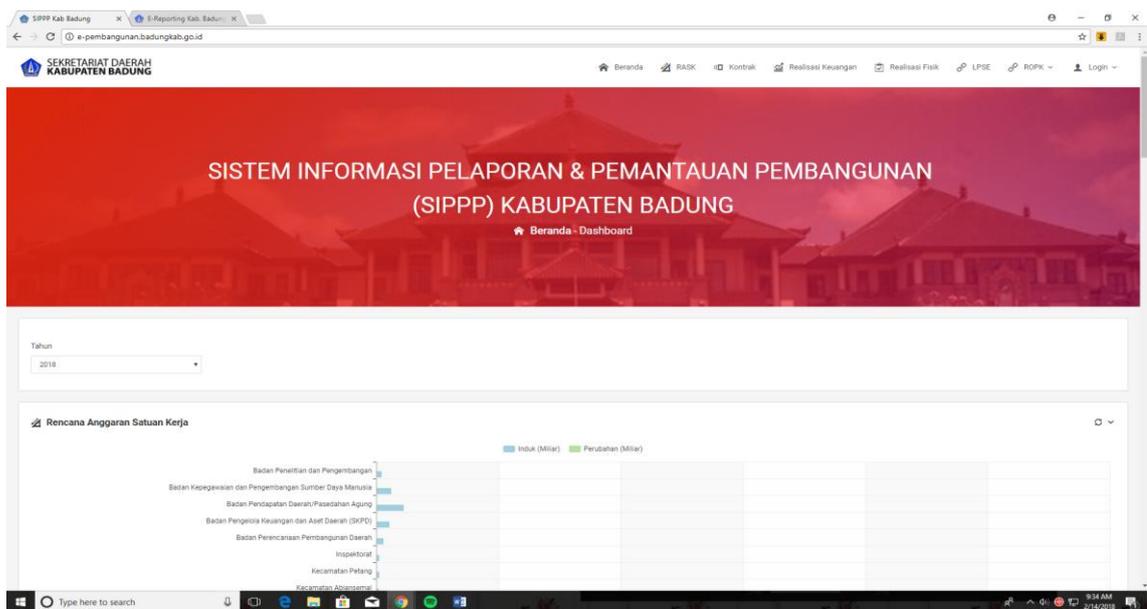
Simda Perencanaan merupakan sebuah sistem berbasis desktop yang digunakan dalam penyusunan dokumen RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan juga RENSTRA (Rencana Strategis) Perangkat Daerah. Sistem ini berfungsi untuk mempermudah penyelarasan Antara RPJM, RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah sehingga tidak jauh melenceng dari perencanaan yang sudah disusun.

5. e-Reporting



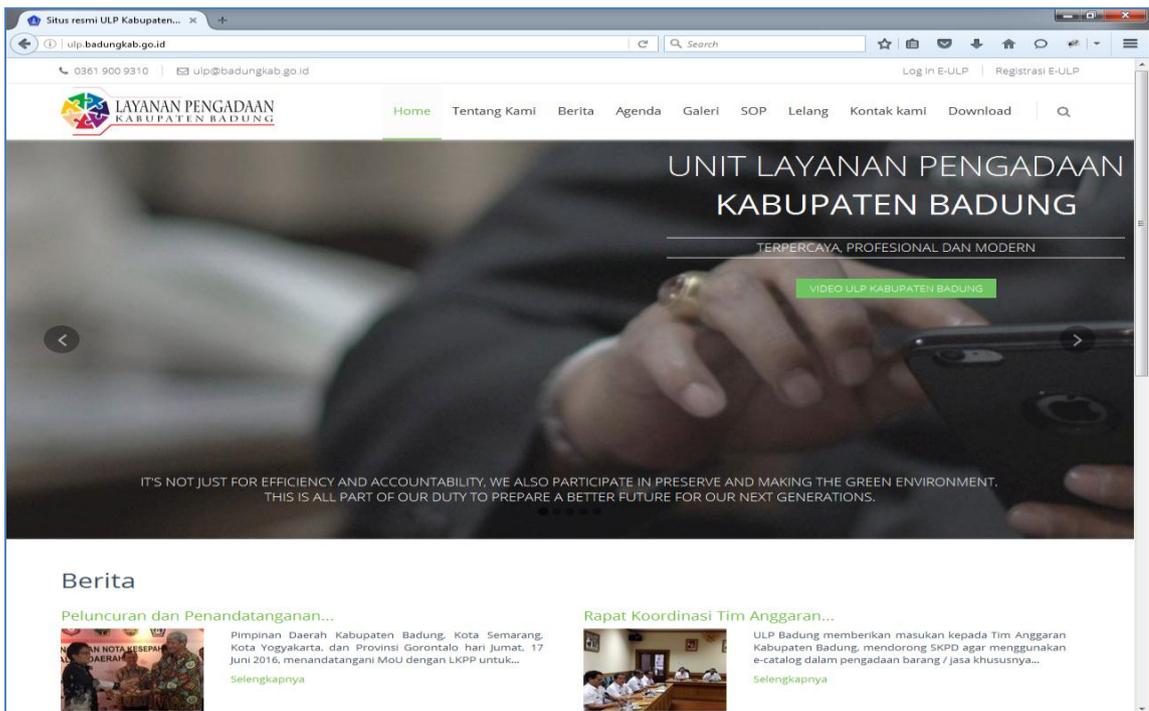
e-Reporting bertujuan memonitoring pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang melalui LPSE. E-reporting menyajikan ringkasan paket pengadaan tiap tahun yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.

6. e- MONEV/ SIPP



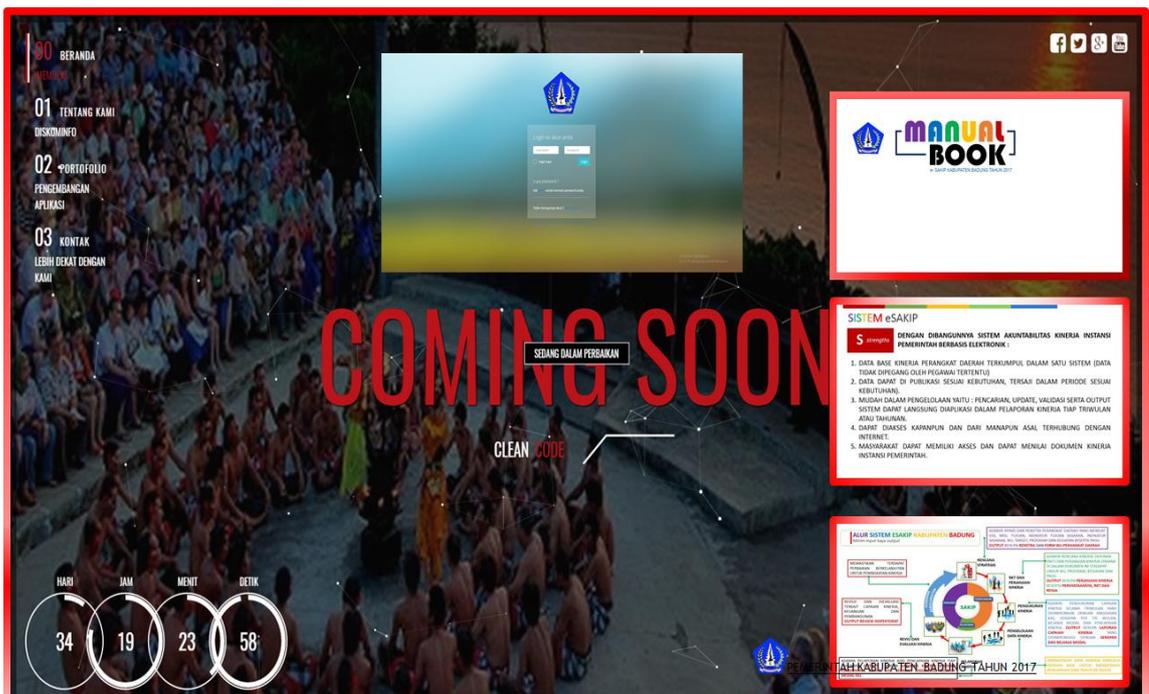
Sistem Informasi Pelaporan dan Pemantauan Pembangunan bertujuan sebagai wadah pelaporan dan pemantauan kegiatan pembangunan di Kabupaten Badung yang disajikan melalui laporan realiasi keuangan, realisasi fisik, serta proses pengadaan barang dan jasa. Sistem ini sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan telah berbasis web.

7. Unit Layanan Pengadaan (ULP)



Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dibentuk untuk menjamin agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara professional, adil, transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien.

8. E-SAKIP



E-SAKIP merupakan aplikasi pelaporan kinerja yang berbasis Web yang membantu pimpinan melakukan monitoring dan mengendalikan capaian kinerja secara cepat serta melaporkan capaian kinerja secara online.

9. Web Badan Pendapatan Daerah Kabupaten badung yang langsung terkoneksi dengan aplikasi - aplikasi untuk mengelola pendapatan Daerah Kabupaten Badung seperti (SIMPAD, SISMIOP, BPHTB, SMART MAP)



## 10. MANGUPURA AWARDS

Mangupura Awards merupakan pemberian penghargaan kepada perangkat daerah yang dinilai memiliki tata kelola pemerintahan dan kinerja yang baik serta masyarakat yang dinilai memiliki prestasi dan mampu mengharumkan nama daerah.



3.4 APRESIASI/ PENGHARGAAN

Daftar penghargaan

No	Penghargaan	Kegiatan	Tanggal	Keterangan
1	<b>AKUNTABILITAS KINERJA BADUNG RAIH PERINGKAT BB</b>	PENILAIAN AKUNTABILITAS KINERJA KABUPATEN BADUNG 2016	1 FEBRUARI 2017	Penghargaan Oleh KEMENTERIAN PAN DAN RB
2	<b>WAHANA TATA NUGRAHA (WTN)</b>	LOMBA TERTIB LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KOTA	2 FEBRUARI 2017	Penghargaan Oleh MENTRI PERHUBUNGAN RI
3	<b>PERINGKAT I NASIONAL SURVEI KEPATUHAN OMBUDSMAN</b>	KOORDINASI DAN INISIASI PUNGUTAN LIAR	17 FEBRUARI 2017	Penghargaan Oleh Ombudsman
4	<b>DAERAH TERTIB UKUR NASIONAL</b>	BADUNG SEBAGAI PUSAT PERESMIAN DAERAH TERTIB UKUR DAN PASAR TERTIB UKUR	27 FEBRUARI 2017	Penghargaan Oleh Kementerian Perdagangan
5	<b>PELAYANAN PUBLIK NASIONAL</b>	PELAYANAN BPUBLIK	20 FEBRUARI 2016	Penghargaan Oleh Kementerian PAN dan RB
6	<b>GERAKAN MENUJU 100 SMART CITY</b>	GERAKAN MENUJU 100 SMART CITY	24 MEI 2017	Penghargaan Oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi RI
7	<b>PEMKAB BADUNG RAIH WTP</b>	KEBERHASILAN KABUPATEN BADUNG MENYUSUN DAN MENYAJIKAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016	15 MEI 2017	Penghargaan Oleh Mentri Keuangan RI
8	<b>JUARA I KTI TINGKAT NASIONAL</b>	LOMBA KTI TINGKAT NASIONAL	30 MEI 2017	Penghargaan Oleh KEMENBUDPAR RI
9	<b>PEMIMPIN PERUBAHAN TERBAIK</b>	INOVASI ADMINISTRASI NEGARA (INAGARA) AWARD 2017 PEMIMPIN PERUBAHAN 2017	8 AGUSTUS 2017	Penghargaan Oleh LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN)
10	<b>TIM PENGENDALIAN INFLANSI DAERAH (TDIP) MENDAPAT PENGHARGAAN PENDATANG BARU</b>	RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN INFLANSI	11 AGUSTUS 2017	Penghargaan Oleh BANK INDONESIA

	<b>TERBAIK TINGKAT NASIONAL</b>			
11	<b>JUARA II NASIONAL GURU PENDIDIKAN KHUSUS</b>	LOMBA PEMILIHAN GURU PENDIDIKAN KHUSUS	23 AGUSTUS 2017	Penghargaan Oleh KEMENBUDPAR RI
12	<b>JUARA I LOMBA DESA TINGKAT NASIONAL</b>	LOMBA DESA REGIONAL II TINGKAT NASIONAL	28 AGUSTUS 2017	MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMOGRASI (PDPT)
13	<b>PERINGKAT I KATEGORI PENGHITUNGAN KONDISI KEUANGAN DAERAH UNTUK REGIONAL BALI, NTB DAN NTT</b>	DIES NATALIES KE-15 MAGISTER AKUTANSI UGM	9 SEPTEMBER 2017	Penghargaan Oleh UNIVERSITAS GAJAH MADA
14	<b>PERINGKAT II KATEGORI PENILAIAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TINGKAT KABUPATEN DAN KOTA UNTUK REGIONAL BALI, NTB DAN NTT</b>			
15	<b>THE MOST ATTRACTIVE AWARD 2017</b>	INDONESIA ATTRACTIVE AWARD 2017	4 OKTOBER 2017	TEMPO MEDIA INTI Tbk.
16	<b>KATEGORI KABUPATEN TERBAIK DENGAN INDEKS 80,53</b>			
17	<b>KABUPATEN TERBAIK KATEGORI PARIWISATA</b>			
18	<b>KABUPATEN POTENSIAL</b>			
19	<b>KABUPATEN TERBAIK PER REGION BALI-NUSRA</b>			
20	<b>PENGHARGAAN UPAKARYA WANUA NUGRAHA</b>	BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT INGGAT NASIONAL	4 OKTOBER 2017	Penghargaan Oleh KEMENTERIAN DALAM NEGERI
21	<b>OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)</b>	KEBERHASILAN KABUPATEN BADUNG MENYUSUN DAN MENYAJIKAN LAPORAN	11 NOPEMBER 2017	KEMENTERIAN KEUANGAN RI

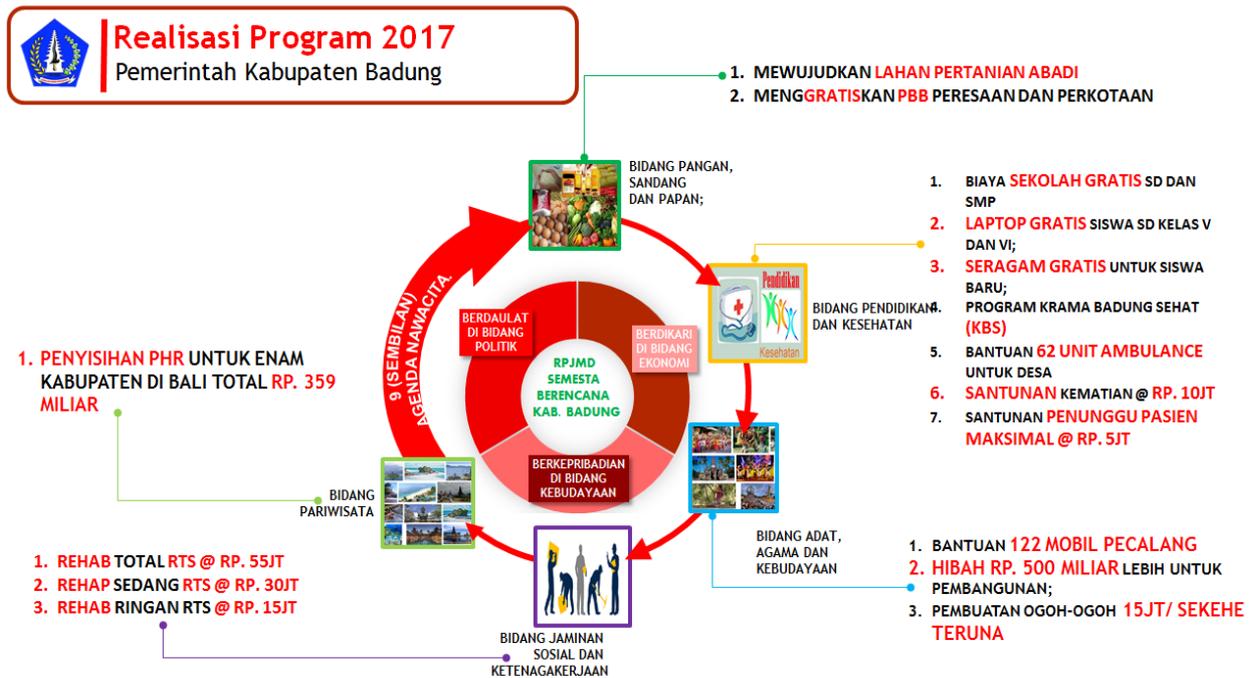
		KEUANGAN		
22	PENGHARGAAN SMART CITY	SEMINAR GERAKAN MENUJU 100 SMART CITY	17 NOPEMBER 2017	Penghargaan Oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi RI
23	Penghargaan Dana Rakça	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN BAIK	8 DESEMBER 2017	Penghargaan Oleh PRESIDEN RI
24	PENGHARGAAN DI BIDANG KEPEDULIAN DAN PEMENUHAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA (HAM)	PERINGATAN HARI HAM SEDUNIA KE-69	11 DESEMBER 2017	Penghargaan Oleh Kementrian Hukum dan HAM RI

## PENUTUP

### Kesimpulan

Komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui penerapan system akuntabilitas kinerja akan terus ditingkatkan. Dari penjelasan diatas secara umum capaian kinerja Tahun 2017 menunjukkan progres yang meningkat. Namun kami akui dalam upaya untuk menumbuhkan budaya kinerja melalui perumusan tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang terukur dan akuntabel masih banyak menemui kendala. Dari 21 indikator kinerja, 15 indicator mencapai target, 5 indikator belum bisa dilaporkan dan 1 indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Secara ringkas digambarkan dalam diagram berikut:





#### Upaya Perbaikan Kinerja

1. Dalam rangka pengumpulan data kinerja yang tepat waktu dilakukan melalui kerjasama dengan Kementerian Agama dan Badan Pusat Statistik;
2. Pelaporan Kinerja secara Online, melalui pengembangan aplikasi berbasis website (e-SAKIP);
3. Dalam upaya menumbuhkan budaya kinerja dilakukan melalui Penyelarasan program/ kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis;
4. Dalam rangka reward dan Punishment dilaksanakan penandatanganan perjanjian kinerja dan pemberian penghargaan mangupura award;

Bupati Badung,

I NYOMAN GIRI PRASTA

**LAMPIRAN II**

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHKABUPATEN BADUNG TAHUN 2016-2021

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Penanggungjawab Perangkat Daerah baru
1. Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya	1. Indeks kerukunan umat beragama	Survei kerukunan umat beragama	83,50	1 Meningkatkan toleransi hidup beragama	1. Indek kerukunan umat beragama	Survey : 1)Hubungan sosial antar kelompok agama, 2)Eksistensi keagamaan, konflik dan resolusi konflik, 3)Kebijakan pemerintah dan 4)Potensi lokal	Balitbang, Bakesbangpol, Disbud, Setda (Bag.Kesra)
				2 Meningkatkan pelestarian adat dan budaya	2 Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	(Jumlah desa budaya/adat maju dibagi dengan jumlah desa budya/adat yang ada dikalikan seratus) + (Jumlah organisasi budya/sekaa tumbuh dan berkembang dibagi jumlah organisasi budaya/sekaa kali seratus) dibagi 2	Disbud, Bapenda/Pasedahan Agung

2	Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	2	Indeks kepuasan masyarakat	Survey indeks kepuasan masyarakat	82	3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	3	Indeks kepuasan masyarakat	Survey indeks kepuasan masyarakat	Balitbang, Seluruh Perangkat Daerah
3	Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional	3	Kategori Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB	80,10 (A)	4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	4	Kategori Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB	Setda (Bagian Organisasi), Inspektorat, Bappeda
		4	Opini BPK	Pernyataan profesional pemeriksa atas laporan keuangan	WTP	5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik Daerah	5	Opini BPK	Pernyataan profesional pemeriksa atas laporan keuangan	BPKAD, Inspektorat, Setda (Bag. Pembangunan), seluruh Perangkat Daerah
		5	Kategori Penilaian Mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Kategori Penilaian Mandiri pelaksanaan Reformasi	A	6	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	6	Kategori Penilaian Mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Kategori Penilaian Mandiri pelaksanaan Reformasi	Inspektorat Setda (Bagian Organisasi)
4	Meningkatnya kualitas SDM dan menurunnya angka kemiskinan	6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks komposit	82,3	7	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	7	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks kebahagiaan	Balitbang, Disdikpora, Diskes, Diskop UKMP, SRUD

dalam masyarakat											
	7	Indek kebahagiaan	Survey tingkat kebahagiaan masyarakat	74,5	8	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	8	Indeks Kebahagiaan	Survey tingkat kebahagiaan masyarakat	Balitbang, Seluruh Perangkat Daerah	
	8	Tingkat Kemiskinan	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk kali 100%	2,05 - 2,00%	9	Menurunnya angka kemiskinan	9	Persentase penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk kali 100%	Dinsos, Bappeda, Seluruh Perangkat Daerah	
5	Menguatnya UMKM dalam menunjang perekonomian kerakyatan	9	Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Nilai produk sektor UMKM dibagi total nilai PDRB kali 100%	7,91%	10	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	10	Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Nilai produk sektor UMKM dibagi total nilai PDRB kali 100%	Diskop UKMP, Disperinaker, Setda (Bag.Perekonomian)
6	Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda dan Perkada	10	Persentase pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti dibagi seluruh pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada kali	100%	11	Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	11	Persentase pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah indikasi pelanggaran Perda dan Perkada yang dapat dicegah dibagi indikasi pelanggaran Perda dan Perkada kali 100%	Satpol PP, Bakesbangpol, Seta (Bagian Hukum dan Ham), seluruh Kecamatan

		100%						
				12 Meningkatkan penegakan Perda dan Perkada	12 Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti dibagi seluruh pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada kali 100%	Satpol PP, Bakesbangpol, Seta (Bagian Hukum dan Ham)	
7	Terwujudnya Pengarusutamaan Gender	11 Indeks Pembangunan Gender	$IPG = 1/3(X)$ Dimana : Xede(1):Xede untuk harapan hidup, Xede(2):Xede untuk harapan pendidikan, I(inc-dls):Indeks distribusi pendapatan	76,13	13 Meningkatnya pengarusutamaan gender	13 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Dimana: Xede(1) : Xede untuk harapan hidup, Xede(2) : Xede untuk harapan pendidikan, I(Inc-dls): Indeks distribusi pendapatan	DP2KBP3A, Balitbang, Disperinaker, Dinsos, Seluruh Perangkat Daerah
8	Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan	12 Indeks pencemaran lingkungan hidup	Penghitungan indikator dari : Indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan hutan/lahan	69,40	14 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	14 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH)	Penghitungan Indikator dari : Indeks Kualitas air, Indeks kualitas udara dan Indeks tutupan hutan/lahan	DLHK, DPKP, DPUPR, Diskes

					15	Indeks Pertanaman (IP)	Luas tanam dibagi luas lahan kali 100% (dalam setahun)	Satpol PP, Disperpa, Setda (Bag.SDA)			
9	Terwujudnya penanggulangan bencana secara terpadu	13	Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Jumlah pemenuhan kapasitas dibagi jumlah kebutuhan kapasitas kali 100%	100%	15	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	16	Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Survei kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	BPBD, DPUPR, DPKP, Dinsos, Diskarmat, Satpol PP, Diskes, RSUD
10	Terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing	14	Tingkat pengangguran Terbuka	Jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja kali 100%	0,31%	16	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	17	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja kali 100%	Disperinaker, Bappeda, Dispar, Dinsos, Diskop UKMP
11	Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	15	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	Jumlah infrastruktur kondisi mantap dibagi jumlah infrastruktur yang ada kali 100%	100%	17	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	18	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	Jumlah infrastruktur kondisi mantap dibagi jumlah infrastruktur yang ada kali 100%	DPUPR, Disbud, Bappeda, DPKP, Diskomonfo, Setda(Bag. Pembangunan)
12	Meningkatnya ketersediaan pangan	16	Skor Pola Pangan Harapan	% AKG kali Bobot	95,50%	18	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	19	Skor Pola Pangan Harapan	% AKG kali Bobot	Disperpa, Diskan, DPUPR
13	Meningkatnya daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor	17	Indeks daya saing destinasi pariwisata	Survei indeks daya saing destinasi pariwisata	75%	19	Meningkatnya daya tarik wisata yang	20	Persentase daya tarik wisata yang berdaya saing	Jumlah obyek wisata yang berdaya saing dibagi seluruh jumlah obyek	Dispar, DPUPR, Disbud

pertanian dan perikanan				berdaya saing		wisata kali 100%	
				20 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	21 Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Nilai produk sektor pariwisata dibagi total nilai PDRB kali 100%	Dispar, Disbud, Diperpa, Diskan, Diskominfo, Diskes, DLHK, PUPR